

NARASI DI BALIK KATA

Pancasila dalam Pidato-Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto (1967-1997)



Virzanira

4415122339

**Skripsi Ini Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Virzanira. Narasi di Balik Kata: Pancasila dalam Pidato-Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto (1967-1997). Skripsi: Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara pidato kenegaraan Soeharto dengan proses hegemoni negara secara kontekstual. Terdapat dua permasalahan dalam skripsi ini yakni *Pertama*, apakah yang melatarbelakangi konten pidato kenegaraan Soeharto, dan *Kedua*, Bagaimana Soeharto menggunakan pidato kenegaraan sebagai alat hegemoni ideologi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang terdiri dari lima tahapan yaitu penentuan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama* bahwa gaya bahasa dan konten pidato Soeharto dipengaruhi oleh latar belakang Soeharto serta latar belakang situasi politik tertentu. Pidato kenegaraan Soeharto terbagi menjadi tiga periode yakni 1) Awal Berdiri (1967-1973), 2) Pergolakan (1974-1984), dan 3) Masa Tenang (1985-1997). *Kedua*, Soeharto menggunakan pidato sebagai alat hegemoninya dengan berbagai cara: 1) Pembahasan dalam pidato Soeharto sebagian besar membahas hal-hal pragmatis daripada hal-hal ideologis, seperti pembangunan negara, dengan menggunakan data-data statistik; 2) Tersirat dalam pidatonya bahwa pemerintahan Orde Baru menolak ideologi lain selain Pancasila; 3) Penggunaan bahasa politik yang baku serta nilai dan norma kesopanan yang otomatis menjadikan Soeharto sebagai pencetus penggunaan bahasa politik yang baik dan benar yang berlaku hingga masa kini.

ABSTRACT

Virzanira. Narration Behind Words: Pancasila in President Soeharto's State Speeches (1967-1997), Essay: Jakarta. Education of History Study Program, Social Sciences Faculty, State University of Jakarta, 2017.

The purpose of this essay is to explain the relation between Soeharto's State Speeches with the process of hegemony contextually. There are two problems in this essay: *First*, what is the background of Soeharto's State Speeches's content, and *Second*, How did Soeharto use state speech as a hegemonic tool of nation ideology. The method of this research is historical method that consist of five step: topic determination, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The result of this research are: *First*, Soeharto's State Speeches's content and language style were influenced by Soeharto's background and also the political situation at that time. Periodically, Soeharto's State Speeches are divided as three: 1) The emergence (1967-1973), 2) The upheaval (1974-1984), and 3) Quiet Period (1985-1997); *Second*, Soeharto was using speeches as hegemonic tool in three different ways: 1) Soeharto's State Speech talks more about pragmatic issues that ideology, such as nation building, by using statical datas; 2) Soeharto's State Speech implied that New Orde were refusing any other ideology besides Pancasila; 3) The application of a normative political language makes Soeharto as the pioneer of normative political language in Indonesia that has been occur until now.

LEMBAR PENGESAHAN

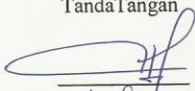
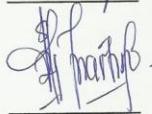


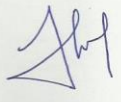
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M. Si.
NIP. 196304121994031002

No.	Nama	TandaTangan	Tanggal
1.	<u>Dr. Abdul Syukur, M. Hum.</u> NIP. 196910102005011002 Ketua		<u>6/2/2017</u>
2.	<u>Sri Martini, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197203241999032001 Sekretaris		<u>6/2/2017</u>
3.	<u>Nur'aini Martha, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197109222001122001 Penguji Ahli		<u>3/2/2017</u>
4.	<u>Dra. Ratu Husmiati, M.Hum</u> NIP. 196307071990032002 Pembimbing I		<u>1/2/2017</u>
5.	<u>Humaidi, M.Hum.</u> NIP. 198112192008121001 Pembimbing II		<u>3/2/2017</u>

Tanggal Lulus : 12 Januari 2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan atau doktor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dari hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan

Virzanira

4415122339

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Live as you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.”

“Hiduplah seakan kau akan mati besok, belajarlh seakan kau hidup selamanya.”

-Mahatma Gandhi-

“It’s my life, it’s now or never. I ain’t gonna live forever. I just want to live while I’m alive.”

“Ini adalah hidupku, sekarang atau tidak selamanya. Aku tidak akan hidup selamanya. Aku hanya ingin (merasa) hidup selama aku hidup.”

-Bon Jovi-

“It’s not our abilities that show what we truly are,. it is our choices..”

“Bukan kemampuan kita yang menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, melainkan pilihan kita..”

-Albus Dumbledore-

Untuk Mama dan Papa yang telah mengajarkanku untuk mengumandangkan suara kebenaran, untuk Uni Nana yang telah mengajarkanku arti kata setia, untuk keluarga besar yang telah mengajarkanku rasanya bahagia dan derita, untuk Om Haris yang telah mengajarkanku untuk lebih memercayai diriku sendiri...
Kupersembahkan skripsi ini untuk kalian semua..

-V-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin.. Setelah satu tahun lebih menggarap skripsi ini, (yang terasa sangat lama), akhirnya penulis sampai di penghujung jalan dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu fase tersulit dalam kehidupan penulis, dan tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi secara moril maupun materiil dalam kelancaran proses skripsi ini.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk merasakan berbagai pengalaman selama menulis skripsi baik di saat yang senang maupun sulit. Penulis sangat bersyukur karena dengan pengalaman ini, penulis dapat belajar untuk lebih sabar dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua Dosen Pembimbing yakni Ibu Ratu Husmiati dan Bapak Humaidi. Terima kasih atas kepercayaan Ibu dan Bapak bahwa saya mampu menjalani penelitian ini. Maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya selama proses penulisan skripsi, seperti misalnya terlambat memenuhi *deadline*, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abdul Syukur selaku Ketua Program Studi atas segala perhatiannya terhadap kami, para Mahasiswa. Tentu penulis ucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Dosen Pendidikan Sejarah yang selama empat setengah tahun telah membimbing dan menginspirasi penulis. Semoga Bapak dan Ibu dosen tetap selalu menjadi cahaya bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mencari jalannya.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orangtua penulis, Mama Ira dan Papa Rifzanil yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang begitu besar untuk penulis, yang mungkin tidak akan pernah mungkin penulis balas. Walaupun Mama dan Papa selalu 'ngomel' dan menanyakan kapan skripsi Virza selesai, Virza tahu kalau Mama dan Papa ingin

yang terbaik untuk Virza. Sesungguhnya pertanyaan Mama dan Papa selalu jadi ‘cambuk’ bagi Virza untuk memberikan yang terbaik.

Kemudian terima kasih juga untuk kakakku tercinta, Uni Nana, yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi segala hal, dari yang penting sampai nggak penting-penting amat.. *You’re the best, sis!* Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Alm. Haris Munandar, Om-ku, yang di hari-hari akhir hidupnya, telah memberikan perhatian yang sangat berharga dengan bersedia menjadi teman diskusi skripsi. *It’s a shame that you’re not here anymore to witness this moment, but it’s okay, because you’ll always be in my heart.* Terima kasih pula untuk keluarga besar Kavling 46 yang telah membuat hari-hariku semasa skripsi menjadi lebih berwarna..

Penulis juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman kelas B 2012 Pendidikan Sejarah untuk 4 tahun yang asyik, khususnya untuk ciwi-ciwi: Ayu, Raisyah, Tami, Alin, Cory, Qolbi, Aini, Dita, Rina, Ghina, Rani, Shanny. Kalian lucu dan sangat rusuh, tapi paling bikin semangat.. Terima kasih pula kepada geng Power Rangers (khususnya Nanur yang sudah mau meluangkan waktu dan menemani penulis melakukan penelitian ke Godean) dan geng BRV, yang tidak pernah lelah memberikan semangat kepada satu sama lain. Terima kasih juga untuk sahabatku, Dinda Kamila, yang bersedia nampung dan ‘ngasih’ saya makan setiap sedang mumet skripsi hehe.. *And last but not least*, untuk kamu yang jauh disana ☺ Terima kasih banyak untuk setiap dukungannya, karena nggak bosan-bosan menyemangati aku selama mengerjakan skripsi, dan juga untuk setiap energi positif yang telah kamu bagikan kepadaku. *It means everything.*

Januari 2017

-V-

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
Aspri	: Asisten Pribadi
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
G30S	: Gerakan 30 September
Gestapu	: Gerakan September Tiga Puluh
Golkar	: Golongan Karya
KNIL	: Koninklijke Nederlands(ch)- Indische Leger
Kopassandha	: Komando Pasukan Sandi Yudha
Malari	: Malam Petaka Lima Belas Januari
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR	: Majelis Perwakilan Rakyat
Nasabri	: Nasionalis, Agama, dan ABRI
Nasakom	: Nasionalis, Agama, dan Komunis
NU	: Nadhlatul Ulama
P3B	: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
P4	: Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PETA	: Pembela Tanah Air
PKI	: Partai Komunis Indonesia
POP	: Peragaan, Olahraga, Perfilman
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRRI/Permesta	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta
PSI	: Partai Sosialis Indonesia

Rapim	: Rapat Pimpinan
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Supersemar	: Surat Perintah Sebelas Maret
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TVRI	: Televisi Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 1968	86
Lampiran 2: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 1969	89
Lampiran 3: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indoneisa 15 Agustus 1974	91
Lampiran 4: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 15 Agustus 1984	97
Lampiran 5: Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 1985	99

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Metode dan Sumber Penelitian	14
BAB II LATAR BELAKANG PIDATO KENEGARAAN SOEHARTO	17
A. Riwayat Hidup Soeharto.....	17
B. Keterlibatan PKI dalam Peralihan Kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru ..	25
C. Konflik-konflik Pembawa Tonggak Kekuasaan Orde Baru	33
a) Masa Transisi Kekuasaan.....	33
b) Rencana Pembangunan Lima Tahun	34
c) Pemilu di Masa Orde Baru	36
d) Malam Petaka 15 Januari	38
e) Koflik-konflik Seputar Upaya Perlindungan terhadap Pancasila	41
BAB III PIDATO DAN HEGEMONI ORDE BARU	47
A. Substansi Utama dalam Pidato Kenegaraan Soeharto.....	48
a) Sejarah.....	49
b) Ideologi	54

c) Politik.....	60
B. Politik Wacana dalam Pidato Kenegaraan Soeharto.....	63
C. Negara Milik Orde Baru.....	71
BAB IV KESIMPULAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86
RIWAYAT HIDUP.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sejarah dunia telah mencatat adanya pidato-pidato penting yang menentukan alurnya sejarah. Jargon demokrasi Amerika yang berisi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan kutipan dari pidato Abraham Lincoln, Pidato *Gettysburg*. Selain itu, ada pula pidato “*I Have a Dream*” oleh Martin Luther King Jr., salah satu pidato yang memiliki pengaruh besar terhadap kesetaraan ras di Amerika. Bila kita mencari contoh pidato besar yang ada di Indonesia, maka kita bisa mengambil pidato Bung Tomo pada peristiwa 10 November. Pidato Bung Tomo ini dikenal sebagai pidato heroik yang membakar semangat ‘arek-arek’ Surabaya dalam melawan serangan Inggris.

Tiga contoh pidato di atas hanya merupakan segelintir dari pidato-pidato besar dalam sejarah. Adapun persamaan antara ketiga pidato ini adalah bahwa ketiganya membawa perubahan besar dalam kehidupan suatu negara. Pidato Lincoln, menandai kebebasan semua budak di wilayah Konfederasi dan penghapusan serta pelarangan perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat, pada Januari 1863.¹ Pidato King, berhasil menggalang dukungan bagi dihapuskannya kebijakan segregasi dan mendorong lahirnya Undang-undang Hak Sipil di tahun 1964 yang

¹ Simon Sebag Montefiore, *Pidato-pidato yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-pidato Bersejarah*. (Jakarta: ESENSI, 2008), p. 50

antara lain memberikan hak pilih dalam pemilu kepada kaum kulit hitam Amerika.² Sedangkan pidato Bung Tomo berhasil menggalang kekuatan dan membangkitkan semangat massa untuk melawan serangan Sekutu ke Surabaya pada November 1945. Peristiwa ini merupakan salah satu upaya terbesar dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tiga contoh pidato di atas menunjukkan bahwa sumber kekuatan bukan hanya berasal dari tekanan fisik, tapi juga dari kata-kata.

Bila membicarakan pidato seorang pemimpin, dalam Sejarah Indonesia terdapat satu tokoh yang sangat menonjol, yakni Presiden Soekarno. Ia terkenal dengan kemampuan orasi-nya yang menggebu-gebu dan gaya bahasanya yang penuh dengan analogi. Kemampuannya berpidato merupakan salah satu kualitas terbaik Soekarno sebagai pemimpin negara. Kemampuannya berorasi, yang mampu menggerakkan massa secara masif, tidak perlu dipertanyakan lagi.

Pada 1965-1967, kekuasaan Soekarno secara berangsur berakhir dan digantikan oleh Soeharto. Bertolak belakang dengan Soekarno, Soeharto memiliki sikap dan pembawaan yang tenang, tidak terkecuali saat berpidato. Roeder mendeskripsikan Soeharto sebagai berikut:

“Pembawaannya kurang gaya, keahlian berpidato dan keagungan seperti Soekarno yang mendahuluinya, ia masih dapat dipuji tetapi membosankan, tingkah lakunya sopan tapi kaku, pidato-pidatonya menarik tapi hampir tidak dapat menimbulkan emosi dan tepuk tangan yang menggemuruh.”³

² *Ibid.*, p. 149

³ O. G. Roeder, *Anak Desa*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), p. 2

Dari deskripsi oleh Roeder di atas kita dapat melihat bahwa pembawaan Soeharto sama sekali bertolak belakang dengan pendahulunya, Soekarno, yang cenderung meledak-ledak dan emosional, terutama ketika berpidato. Karena itu, dalam tulisan ini penulis memilih objek lain selain Soekarno untuk dijadikan sorotan, yaitu pidato dari sosok Soeharto.

Sejak masa pemerintahan Soeharto, terdapat satu pidato kenegaraan yang dilaksanakan setiap tahun, menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia, setiap tanggal 16 Agustus. Isi dari pidato ini adalah laporan pertanggungjawaban tahunan oleh presiden kepada DPR/MPR. Sasaran pendengarnya adalah seluruh bangsa Indonesia dan isi tiap-tiap pidatonya merupakan suatu tinjauan ulang pada tiap-tiap peristiwa penting dari tahun sebelumnya suatu uraian petunjuk-petunjuk untuk masa depan.⁴

Soeharto, sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-2, sering kali dibandingkan dengan Soekarno. Dilihat dari latar belakang kehidupan hingga cara keduanya memimpin sangatlah berbeda hingga menimbulkan pro dan kontra terhadap keduanya. Salah satu perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah cara mereka berpidato, baik dari segi intonasi, bahasa tubuh, gaya bahasa, serta konten pidatonya.

Dalam *Bahasa dan Kekuasaan*, Hooker mendeskripsikan masing-masing gaya pidato Orde Baru dan Orde Lama sebagai berikut:

“Pidato-pidato Orde Baru terkendali, terencana, terarah dan mengarahkan, mengambil jarak dengan pendengarnya, dan tidak ditawar-tawar melalui

⁴ Virginia Martheson Hooker, *Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru dalam Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), p.61

dialog ataupun pertanyaan. Agak berbeda dengan pidato Orde Lama yang akrab dengan pendengarnya, melibatkan emosi, tanpa kendali, secara terbuka memberi kesempatan untuk tawar menawar, dan lebih menjelaskan aksi-aksi dan kondisi-kondisi masa lalu daripada merumuskan rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk untuk masa depan.”⁵

Perbedaan antara kedua presiden ini bukannya tidak berhubungan sama sekali. Untuk memahami hubungan keduanya, maka harus dijelaskan mengenai kondisi Indonesia pada masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto masing-masing dikenal sebagai Orde Lama dan Orde Baru. Kedua istilah ini baru diciptakan pada masa pemerintahan Soeharto untuk menunjukkan, khususnya pada masyarakat, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua pemerintahan ini, bahwa pemerintahan Soeharto bukanlah perpanjangan tangan dari pemerintahan yang sebelumnya. Namun, yang paling utama adalah untuk menunjukkan, bahwa terdapat kesalahan pada era yang sebelumnya.

Pemerintahan Orde Baru mengacu kepada masa pemerintahan yang bertujuan untuk mengembalikan lagi tujuan negara Indonesia kepada Pancasila. Hal ini diperjelas oleh Dakidhae yang mengutip dari “sumbangan fikiran TNI-AD” kepada kabinet ampera sebagai berikut:

“Orde Baru adalah suatu tata-kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan Pantja Sila, UUD 1945, dan yang setjara legalistis mempunyai perintjian idiil dan orperasionil dalam Ketetapan-ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke-IV tahun 1966.”⁶

⁵ *Ibid.*, p. 71

⁶ Daniel Dakidhae, *Cendekiawan dan Kekuasaan: Dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 247

Kutipan di atas menunjukkan tujuan dari tatanan Orde Baru. Alasan Orde Baru menganggap Orde Lama menyimpang adalah eksistensi dari Demokrasi Terpimpin sendiri. Selain itu, ideologi Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)⁷ yang dicetuskan oleh Soekarno tidak bisa dianggap sejalan dengan ideologi Pancasila. Bagi Orde Baru, masa Orde Lama adalah mimpi buruk: krisis ekonomi, gerakan separatis, huru-hara politik dan percobaan kudeta berdarah. Hal ini merupakan kutukan dan harus di tumpas.⁸

Gerakan 30 September (G30S) merupakan peristiwa paling penting yang akan menentukan lanskap politik dan kultural untuk sekian dekade ke depan.⁹ Soeharto memiliki kesempatan untuk berkuasa karena adanya peristiwa Gestapu atau G30S. PKI yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi eksistensi Demokrasi Pancasila, berhasil disingkirkan karena dianggap terlibat dalam peristiwa G30S. Setelah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) ditandatangani, Soeharto akhirnya memegang kekuasaan. Walaupun Soeharto belum dilantik secara resmi sebagai pejabat presiden, kekuasaan secara eksekutif sudah berpindah tangan kepada Soeharto. Meski begitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan korps perwira Brawijaya dan Diponegoro

⁷ Pada pertengahan 1960-an, Sukarno memperkenalkan konsep Nasakom sebagai simbol persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini merupakan konsep yang dihidupkan kembali dari pemikiran Sukarno pada tahun 1926/1927 bahwa kepentingan nasionalis, Islam, dan marxis dapat sama dan cocok satu sama lainnya. Lebih jelas, baca Peter Kasenda, *Sukarno, Marxisme, & Leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2014

⁸ Yudi Latif dan Idi Subandri Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* dalam *Bahasa dan Kekuasaan...*, p. 25

⁹ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), p. 193

Angkatan Darat masih loyal terhadap Presiden Soekarno.¹⁰ Karena itu, Soeharto harus mencari cara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin.

Perintahnya yang pertama sebagai pemegang Supersemar adalah pembubaran PKI dengan segala organisasi mantelnya di seluruh Tanah Air, sambil tetap harus “berpegang teguh kepada Panca Azimat Revolusi Indonesia”.¹¹ Sejak bulan Oktober 1965, pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan dengan PKI memang sudah terjadi. Namun, perintah pembubaran PKI tersebut menjadikannya resmi.

Untuk mendapatkan dukungan dan pembenaran dari masyarakat atas tindakan pembasmian PKI ini, Soeharto menggunakan kekuatan media massa. Soeharto memastikan bahwa terror PKI tetap menggema. Melalui media massa, dan khususnya melalui pidato-pidatonya Soeharto berhasil meyakinkan masyarakat bahwa PKI adalah musuh negara. Seperti pendapat Budiman, bahwa keberhasilan Orde Baru tidak hanya berdasarkan prestasi ekonominya, melainkan juga dari sejauh mana rezim ini bisa menciptakan sebuah trauma politik yang tetap terpelihara di kepala rakyatnya.¹² Hal ini berkali-kali ditekankan dalam pidato-pidato kenegaraannya, salah satunya pada 16 Agustus 1969 yakni sebagai berikut:

¹⁰Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013), p. 37

¹¹*Ibid.*, p. 36

¹² Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), p. 135

“Sedjak semula, kita menumpas pemberontakan G-30-S/PKI bukanlah karena alasan-alasan balas dendam, melainkan karena alasan prinsipil. Tujuan kita yang utama adalah menjelamatkan Pantja Sila.”¹³

Soeharto mulai melakukan pidato-pidato kenegaraan sejak Agustus 1967. Dalam pidato-pidato ini lah Soeharto menerapkan konsistensi bahasa dan istilah-istilah yang nantinya berkembang selama masa pemerintahan Orde Baru. Tujuh bulan setelah pidato kenegaraannya yang pertama, Soeharto dilantik secara resmi pada sidang MPRS 27 Maret 1968.

Dakhidae, dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, menyebutkan istilah *eufemisme*. Berdasarkan analisisnya terhadap buku *Language and Power* oleh Anderson, Bahasa Jawa mang-*krama*-niasikan bahasa Indonesia, meng-*ngoko*-kan bahasa Indonesia secara tidak sadar.¹⁴ Kalimat yang tepat berdasarkan *Kuasa Kata*, yakni *Kramanisasi bahasa publik Indonesia*.¹⁵ *Pernyataan* ini sesuai dengan definisi eufemisme yang berarti ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.¹⁶ Inilah yang terjadi pada masa Orde Baru. Pidato-pidato Soeharto merupakan salah satu sarannya.

Untuk melancarkan proses eufemisme, melalui TAP MPR No. 11/MPR/1983 ditetapkan bahwa bahasa harus dibina dan dikembangkan serta

¹³ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Djenderal Soeharto, Di Depan Sidang DPR-GR, 16 Agustus 1969, Jakarta: Perpustakaan Nasional

¹⁴ Dakhidae, *Op.Cit.*, p. 383

¹⁵ Benedict R. O’G Anderson, *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2000), p. 310

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/eufemisme>, Diakses pada 6 Februari 2016

digunakan secara baik dan benar.¹⁷ Realisasi dari ketetapan ini adalah dengan didirikannya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) yang bertindak sebagai penentu arah pengembangan sekaligus pengawas bahasa.¹⁸ Rezim Orde Baru Soeharto memanfaatkan bahasa sebagai cara untuk mendominasi kesadaran massa, tidak dengan retorika, melainkan dengan apa yang disebut dengan “pembinaan bahasa yang baik dan benar.”¹⁹

Eufemisme digunakan oleh Soeharto sesungguhnya untuk mencapai suatu hegemoni. Berbeda dengan pemerintahan diktator yang cenderung bersifat represif, hegemoni, baru dapat dicapai dengan adanya persetujuan masyarakat yang luas.²⁰ Dengan menerapkan eufemisme bahasa, Soeharto memasukkan ide-ide dan konsep-konsep tertentu ke dalam pikiran masyarakat. Dengan begitu, Soeharto dapat melegitimasi kekuasaannya tidak selalu melalui tindakan-tindakan represif. Orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, tetapi hanya lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat.²¹ Bila Soeharto melakukan tindakan represif secara terus menerus, maka itu berarti ia melakukan kesalahan yang sama dengan pemimpin sebelumnya, menyimpang dari Pancasila.

¹⁷ Benny H. Hoed. et.al, *Bahasa Sebagai Arena Pertarungan: Sebuah Pendahuluan dalam Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*, (Jakarta: LIPI Press, 2004), p. 1

¹⁸ *Ibid.*, p. 2

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Robert Boccock (ed.), *Passive Revolution and the Politics of Reform* dalam *Approaches to Gramsci* dalam *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), p. 32

²¹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), p. 588

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap pidato-pidato kenegaraan Soeharto. Terdapat empat alasan mengapa penulis memilih pidato sebagai objek kajian. Pertama, penulis mempertimbangkan pidato berdasarkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi pada masa itu. Tiga media yang digunakan masyarakat pada masa Orde Baru yakni surat kabar, radio, dan televisi. Sampai akhir 1980-an, TVRI menjadi media massa paling dominan dengan jangkauan ruang paling luas di seluruh kepulauan Nusantara.²² TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang langsung di bawah pengelolaan pemerintah. Maka ketika Soeharto melakukan pidato, saluran televisi ini akan menayangkannya.

Menurut penulis, hampir setiap kalangan kemungkinan besar mendengarkan pidato-pidato Soeharto, karena tidak seperti hari ini, saat internet digunakan sebagai sumber informasi, masyarakat Orde Baru hanya menggunakan radio dan televisi sebagai sumber informasi mereka. Lagipula, seperti kata Budiman, bahwa kita tidak bisa hidup dalam ruang yang sepenuhnya bebas dari infiltrasi media dan budaya massa.²³ Alasan di atas berhubungan dengan alasan kedua, bahwa pidato juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan persetujuan atau pelarangan secara resmi²⁴ sehingga kekuatannya lebih mengikat bila dibandingkan dengan opini pers.

Ketiga, pidato Soeharto menarik untuk dibahas karena ia sendiri tidak memiliki karakteristik yang menggebu-gebu. Soeharto membawakan pidatonya dengan intonasi yang stabil. Gaya bahasa-nya tidak 'berbunga-bunga' seperti

²² Hikmat Budiman, *Op.Cit.*, p.170

²³ *Ibid.*, p.32

²⁴ Hooker, *Op.Cit.*, p. 64

pidato Soekarno. Isi pidato Soeharto pun juga tidak begitu berapi-api layaknya pidato Bung Tomo. Pengaruh pidato Soeharto tidak bersifat instan melainkan bertahap.

Terakhir, mengapa penulis memilih pidato Soeharto sebagai objek kajian penelitian, karena hingga saat ini tidak terlalu banyak penelitian yang membahasnya. Penelitian-penelitian mengenai pidato lebih banyak terfokus pada Soekarno. Karena itu pidato-pidato Soeharto layak untuk mendapatkan perhatian yang lebih.

Tiga puluh dua tahun bukan lah waktu yang singkat. Soeharto berhasil menerapkan konsistensi selama ia menjabat sebagai presiden. Bahasa dan istilah-istilah yang muncul pada masa ini tentunya mempengaruhi masyarakat dan membentuk suatu kebudayaan yang pada akhirnya menjadi dasar dari Indonesia yang sedang berdiri saat ini. Sejalan dengan pandangan Marxis-strukturalistik oleh Louis Althusser bahwa teks tidaklah dibentuk oleh subjek (agen); sebaliknya subjeklah yang dibentuk oleh teks.²⁵

Sebelum penulis, terdapat penelitian lain mengenai pidato kenegaraan Soeharto yang berjudul *Bahasa Negara versus Bahasa Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Obor tahun 2004. Buku ini mengkaji pidato Soeharto dan selebaran gerakan mahasiswa menggunakan teori semiotika. Penelitian ini fokus kepada penanda dan petanda dalam teks itu sendiri. Meskipun begitu penulisan buku ini tidak menggunakan metode historis.

²⁵ Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Op.Cit.*, p. 19

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari dasar pemikiran di atas, penulis menetapkan tahun 1967-1997 sebagai batasan temporal. Tahun 1967 dipilih sebagai awal batasan karena pada tahun tersebutlah Soeharto telah dianggap sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia, walaupun pada saat itu belum dilantik secara resmi. Soeharto baru dilantik secara resmi sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968.

Tahun 1997 dipilih sebagai akhir batasan karena pada tahun tersebut Soeharto melakukan pidato kenegaraan tahunannya yang terakhir. Pidato kenegaraan tahunan dilakukan pada setiap bulan Agustus, sedangkan pada 21 Mei 1998, Soeharto telah lengser dari jabatan presiden.

Dalam batasan spasial, penulis menentukan wilayah Indonesia sebagai batasannya. Hal yang ingin dipastikan oleh penulis adalah dampak pidato terhadap opini rakyat Republik Indonesia. Ini berarti reaksi dunia internasional tidak termasuk di dalamnya. Seperti yang dikatakan Hoed, bahasa merupakan faktor pemersatu, tetapi juga merupakan faktor pemisah. Seseorang yang berbahasa Indonesia akan merasa berbeda jati dirinya apabila berbicara dengan seseorang yang berbahasa Malaysia.²⁶ Karena itu penulis beranggapan bahwa dampak pidato di kacamata dunia internasional akan sama sekali berbeda arahnya dengan dampaknya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan bahasa serta budayanya.

²⁶ Benny H. Hoed, *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), p.129

Ketiga, penulis membatasi kajian ini secara tematis. Penulis membatasi kajian pidato Soeharto berdasarkan tema-tema tertentu dalam pidatonya. Pidato-pidato yang dipilih oleh penulis adalah pidato yang bertema Pancasila dan Falsafah Negara. Alasan penulis memilih tema tersebut karena menurut pengamatan penulis, melalui tema tersebutlah Soeharto menciptakan bahasa-bahasa pada masa Orde Baru dengan menggunakan Pancasila sebagai legitimasinya. Berdasarkan pembatasan secara tematis itu, penulis akan fokus kepada pidato-pidato yang bersifat reaktif, khususnya terhadap permasalahan-permasalahan ideologi. Reaktif yang dimaksud adalah bahwa isi dalam pidato-pidato tersebut merupakan reaksi dari situasi politik di masa itu. Ini berarti penulis fokus kepada pidato-pidato pada tahun-tahun penting yakni pada tahun 1967-1969 (Masa peralihan kekuasaan), 1971 (Pemilu pertama pada masa Orde Baru), 1973-1974 (Penyederhanaan partai dan Malari), 1977-1978 (Demonstrasi penolakan pencalonan kembali Soeharto dan Pemilu), 1980 (Petisi 50), 1983 (Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal), dan 1984 (Peristiwa Tanjung Priok).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi konten pidato kenegaraan Soeharto?
2. Bagaimana Soeharto menggunakan pidato kenegaraan sebagai alat hegemoni ideologi negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara pidato-pidato kenegaraan Soeharto dengan proses hegemoni negara secara kontekstual. Untuk memahami pidato Soeharto, kita perlu mengetahui latar belakang Soeharto. Dengan mengetahui latar belakangnya, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai lingkungan dan budaya seperti apa yang membentuk pemikiran seorang Soeharto.

Nama Soeharto dikenal sebagai salah satu pemimpin yang paling langgeng kekuasaannya. Kekuasaannya selama tiga puluh dua tahun menunjukkan bahwa Soeharto memiliki cara yang efektif untuk melanggengkan kekuasaannya atas nama demokrasi. Dari segi politik, ia menerapkan dwifungsi ABRI yang memastikan kekuatan politiknya tersebar di setiap golongan. Pada tahun 1968, 17 dari 25 provinsi diperintah oleh perwira militer; pada tahun 1969, lebih dari setengah dari kekuasaan bupati dan walikota adalah militer.²⁷ Secara budaya, ia membungkam seniman-seniman yang melakukan kritik terhadap pemerintahan melalui ekspresi seni. Dari segi sosial, ia berhasil menciptakan konsep dan bahasa-bahasa yang membudaya di masyarakat, menggunakan kekuatan media massa untuk menyebarkannya. Soeharto mampu menancapkan pengaruhnya di berbagai segi kehidupan, sehingga tanpa disadari masyarakat, ia memiliki setiap dukungan yang diperlukannya.

Untuk memahami pidato Soeharto, penulis juga melakukan perbandingan pidato Soeharto dengan pidato Soekarno dari segi pembahasan topik-topik sejarah

²⁷ Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 610

dalam pidato keduanya untuk melihat perbedaan dan perubahan apa yang dibawa Soeharto dalam penggunaan bahasa serta penggunaan sejarah dalam pidato-pidatonya. Dengan begitu kita dapat mengerti mengapa terjadi perubahan-perubahan tersebut, dan bagaimana dampaknya dalam pandangan masyarakat terhadap politik dan sejarah sejak masa Orde Baru hingga kini.

Berdasarkan penjabaran di atas, kegunaan penelitian ini secara akademis adalah memberikan sumbangan pengetahuan terhadap beberapa bidang ilmu yakni sejarah, politik, dan linguistik. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu sistem pemerintahan mempertahankan kekuasaannya dan memberikan suatu refleksi bagi masyarakat maupun pemerintahan di masa kini dan masa depan.

Dengan mempelajari pidato-pidato kenegaraan Soeharto secara kontekstual, kita dapat memahami bagaimana seorang Soeharto dapat mempertahankan hegemoninya sebagai penguasa selama lebih dari tiga dekade, dengan menggunakan bahasa sebagai salah satu kekuatan utamanya.

D. Metode dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Menurut Kuntowijoyo, penelitian historis atau sejarah mempunyai lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.²⁸

Pada tahap pertama, penulis menentukan topik. Penentuan topik harus didasari oleh dua syarat yakni kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang perubahan bahasa politik di

²⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 1995), hal 89

Indonesia, yang merupakan kedekatan emosional. Sedangkan secara intelektual, penulis telah membaca literatur-literatur yang bertema linguistik dan juga sejarah Orde Baru.

Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data atau heuristik. Dalam penelitian sejarah, terdapat dua macam sumber yaitu sumber berdasarkan sifatnya dan sumber berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber sejarah primer dan sekunder. Sedangkan berdasarkan jenisnya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber sejarah lisan, tertulis, benda, serta rekaman.

Berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila disampaikan oleh saksi mata. Contoh-contoh sumber primer antara lain catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan seorang asisten residen pada abad ke-19.²⁹ Sumber primer yang digunakan adalah naskah teks pidato kenegaraan Soeharto dari tahun 1968 hingga 1997. Naskah pidato merupakan salah satu arsip kenegaraan karena itu dianggap sebagai sumber primer. Penulis mendapatkan sumber-sumber tersebut dari *website* resmi Perpustakaan Nasional dan juga Arsip Nasional Republik Indonesia.³⁰

Sedangkan sumber sejarah sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh saksi mata. Menurut Kuntowijoyo, buku kebanyakan merupakan

²⁹ *Ibid.*, p. 98-99

³⁰ Kepustakaan Presiden, *Naskah Pidato*, http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?presiden_id=2&presiden=suharto, diakses tanggal 9 Februari 2016

sumber sekunder.³¹ Untuk sumber sekunder, penulis menggunakan berbagai literatur-literatur linguistik dan juga sejarah yang berhubungan dengan penelitian ini seperti artikel, autobiografi, biografi, buku-buku tentang era Orde Baru, serta buku-buku linguistik dan komunikasi politik. Sumber-sumber ini penulis dapatkan dari berbagai tempat seperti Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, dan Arsip Nasional.

Setelah tahap pengumpulan data, penulis melakukan verifikasi data atau pengecekan keabsahan data. Dalam tahap ini penulis melakukan kritik ekstern dan intern. Tahap ini perlu dilakukan untuk memastikan keaslian dan keautentisitasan suatu sumber.

Setelah pengecekan keabsahan data selesai dilakukan, selanjutnya penulis melakukan interpretasi. Sejarah memang ditulis berdasarkan fakta, namun interpretasi sangat diperlukan, karena kebenaran sejarah tidak ada yang mutlak. Untuk mendapatkan kebenaran sejarah penulis perlu melihat permasalahan dari berbagai perspektif, kemudian menginterpretasinya.

Tahap terakhir adalah tahap penulisan atau historiografi. Dalam tahap ini penulis akan menjabarkan hasil analisisnya dalam bentuk tulisan. Tahap ini merupakan tahap terpenting karena sebanyak apapun literatur yang dibaca dan sebagus apapun interpretasi seseorang, jika tidak disampaikan kepada orang lain, maka akan menjadi sia-sia.

³¹ Kuntowijoyo, *Loc.Cit.*, p. 99

BAB II

LATAR BELAKANG PIDATO KENEGARAAN SOEHARTO

A. Riwayat Hidup Soeharto

Soeharto merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang riwayat hidupnya kontroversial. Dari masa Orde Baru hingga Reformasi sudah sangat banyak yang menulis biografi Soeharto. Meski begitu, dalam setiap biografinya terdapat beberapa perbedaan informasi mengenai riwayat hidupnya, khususnya riwayat hidupnya semasa kecil.

Permasalahan akan asal-usul Soeharto, pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 1974. Salah satu majalah terbitan ibukota, *POP (Peragaan, Olah Raga, Perfilman)*, dalam edisi No. 17 tahun terbitan ke II menuliskan yang disebut sebagai “sorosilah” (silsilah) dari Presiden Soeharto. Dituliskan dalam majalah tersebut bahwa Soeharto sebenarnya adalah keturunan ningrat. Silsilah yang dituliskan oleh *POP* tersebut disanggah kebenarannya oleh Probosutejo, adik seibu dari Soeharto. Karena hal ini, surat izin terbit dan izin cetak majalah itupun dicabut.¹ Untuk meluruskan kasus tersebut, Soeharto mengadakan konferensi pers di kantornya di Bina Graha.

¹ O.G. Roeder, *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), p. 140

Dalam konferensi pers tersebut, Soeharto menjelaskan riwayat hidupnya. Ia membantah keras setiap isu-isu yang memberitakan bahwa ia adalah keturunan ningrat. Ia menekankan bahwa ia hanyalah berasal dari keluarga petani miskin

Alasan Soeharto mengungkapkan “rahasia” pribadi tersebut adalah untuk mencegah pihak-pihak subversif mengambil kesempatan untuk bertindak dengan memanfaatkan situasi. Berikut argumen yang dipaparkannya dalam otobiografinya:

“Sebenarnya Presiden yang sekarang itu keturunan dari mana? Kalau itu sudah menimbulkan pembicaraan, timbul kemudian pro dan kontra. Kalau timbul pro dan kontra, dengan sendirinya mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing dan bisa terjadi perselisihan. Ini kesempatan yang baik untuk pihak yang melakukan subversi dalam melaksanakan gerpolnya, dan dapat meningkatkan gangguan stabilitas nasional.”¹

Menurut otobiografinya, Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di desa Kemusuk, daerah Argomulyo, Godean, sebelah Barat kota Yogyakarta. Ayahnya bernama Kertosudiro dan ibunya bernama Sukirah. Namun, belum lagi Soeharto berumur 40 hari, ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah karena suatu masalah.

Setelah melahirkan Soeharto, Sukirah dalam keadaan tidak sehat sehingga tidak mampu mengurus Soeharto. Karena itu sejak bayi hingga umur empat tahun, Soeharto diurus oleh neneknya. Baik dalam otobiografinya atau dalam tulisan Roeder, dijelaskan bahwa perpisahan ibu dan ayahnya membuat Soeharto harus berpindah-pindah asuhan, tempat tinggal, juga sekolah. Dalam tempo sepuluh tahun semasa kecilnya, Soeharto sebanyak enam kali berpindah pengasuh.² Orang-orang yang mengasuhnya antara lain neneknya, bibi dan pamannya, serta ibu dan ayah tirinya.

¹ G. Dwipayana dan Ramadhan K. H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, (Jakarta: Citra Lantoro Gung Persada, 1989), p. 7

² Asvi Warman Adam dalam Kata Pengantar R.E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2001), p. x

Soeharto berbeda dengan pemimpin Jawa pada umumnya yang berusaha keras untuk melegitimasi kekuasaannya melalui silsilah keluarga. Sebaliknya kesan bocah petani sederhana yang berjuang sendirian sejak kecil dalam dunia yang kejam tanpa belas kasih kelak menjadi dorongan dalam persepsi Soeharto tentang dirinya sendiri.³ Dalam penjelasan-penjelasan mengenai masa kecilnya, Soeharto menceritakan pengalaman-pengalamannya yang dekat dengan kehidupan pertanian, di antaranya, ketika kaki-nya terluka terkena sabit dan tentang kerbau-nya yang terperangkap di sungai. Cerita-cerita yang meyakinkan bahwa Soeharto memang tumbuh di lingkungan pertanian, alih-alih anak keturunan ningrat.

Sejak umur empat hingga tujuh belas tahun, Soeharto terus berpindah-pindah sekolah akibat permasalahan keluarganya. Menurut Soeharto, setelah menyelesaikan pendidikannya pada 1939, ayahnya mengatakan padanya untuk mulai mencari pekerjaan karena ayahnya tidak mampu lagi membiayai sekolahnya. Meski begitu, Soeharto merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan di Kemusuk, maka ia kembali ke tempat tinggalnya dulu, di rumah bibinya di Wuryantoro. Disana ia mendapat pekerjaan sebagai asisten pegawai di bank desa (*Volksbank*). Soeharto tidak begitu menikmati pekerjaannya, sehingga ketika ia harus berhenti bekerja karena kain sarung yang dipakainya sebagai seragam kerjanya rusak, ia mengaku tidak menyesalinya.

Pada tahun-tahun itu, Belanda sedang membuka kesempatan luas bagi pemuda-pemuda yang ingin bergabung dengan kemiliteran. Tak terkecuali, Soeharto merupakan salah satu yang tertarik untuk bergabung. Saat pertama kali

³ R. E. Elson, *Suharto: Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2001) , p. 28

mencoba untuk bergabung dengan kemiliteran, datang lowongan pekerjaan di Angkatan Laut Belanda. Namun, karena lowongannya sebagai tukang masak, Soeharto menolaknya. Setelah itu, Soeharto mencoba melamar kembali dan berhasil masuk dalam Sekolah Militer di Gombang, Jawa Tengah pada Juni 1940.

Menurut penjelasan Soeharto dalam otobiografinya, pekerjaan yang baru ini menyenangkan baginya. Namun, dinas kemiliteran Soeharto dalam tentara KNIL hanya bertahan selama dua tahun dikarenakan pecahnya Perang Dunia II. Belanda menyerah pada Jepang dan Indonesia-pun jatuh ke tangan Jepang.

Setelah menganggur beberapa waktu, Soeharto mencoba peruntungannya dan bergabung dengan kepolisian Jepang. Atas nasehat atasannya yang seorang Jepang, Soeharto masuk dalam barisan PETA. Pengalamannya dalam PETA inilah yang menjadi cikal bakal karir Soeharto dalam kemiliteran Indonesia setelah kemerdekaan.

Masa-masa sebagai tentara PETA merupakan masa-masa yang berat. Menurut Soeharto, pada masa-masa inilah rasa cinta tanah air tertanam lebih dalam lagi di hati Soeharto. Meski begitu, masa abdi Soeharto dalam barisan PETA, berakhir setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Soeharto meneruskan karir militernya dalam BKR, yang menjadi cikal bakal TNI.

Pada masa revolusi, Soeharto terlibat dalam beberapa peristiwa penting, salah satunya dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Dalam otobiografi dan penjelasan Roeder, Soeharto memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut, yakni sebagai otak perencana serangan itu. Namun, Elson membantah, ia

meragukan kebenaran dari cerita tersebut. Soeharto bukanlah otak dari Serangan Umum 1 Maret seperti yang diseru-serukan. Cerita tersebut dibesar-besarkan untuk membangun prestasi Soeharto sebagai presiden.

Dalam keadaan genting, di tengah-tengah jalannya revolusi, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah. Siti Hartinah adalah teman sekelas dari Sulardi, sepupu Soeharto, semasa sekolah dasar. Perempuan yang kerap dipanggil 'Bu Tin' ini merupakan anak dari Wedana, pegawai Mangkunegaran, yang berarti adalah keturunan ningrat. Siti Hartinah nantinya memiliki peran pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai ibu negara.

Karir Soeharto dalam kemiliteran berlanjut hingga peristiwa G30S muncul ke permukaan. Pada masa itu Soeharto telah mencapai salah satu pangkat penting yakni Jenderal, walaupun bukan seorang Jenderal yang terkenal di kalangan masyarakat. Namun, peristiwa G30S merubah hal tersebut. Inilah titik balik Soeharto yang membawanya ke kursi kepresidenan selama 32 tahun.

Riwayat hidup Soeharto di atas merupakan ringkasan yang sebagian besar ditulis berdasarkan otobiografi dan biografi yang diterbitkan pada masa Orde Baru. Sumbernya, tak lain, adalah dari ucapan Soeharto sendiri. Sedangkan dalam biografi yang baru terbit pada masa Reformasi, oleh Elson, menuliskan riwayat hidup Soeharto dari perspektif yang sama sekali berbeda. Dari orang ketiga, tanpa wawancara.

Menurut Elson, terdapat berbagai kejanggalan dalam cerita-cerita Soeharto. Salah satunya adalah mengenai penekanan Soeharto sebagai anak petani miskin. Elson berargumen: Bagaimana mungkin seseorang yang begitu miskin

seperti Kertosudiro bisa mengirim anaknya ke sekolah pada usia yang begitu muda, padahal zaman itu hanya sedikit anak Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan formal?⁴

Kejanggalan lainnya adalah hubungan antara Soeharto dan ayahnya. Semasa ia kecil ia hampir-hampir tidak pernah berhubungan dengan ayahnya, tetapi di suatu waktu ayahnya datang dan memberikannya seekor kambing. Hadiah yang mahal bagi seorang petani miskin yang tidak memiliki lahan.⁵

Teori Elson untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan ini adalah benar adanya isu-isu yang mengatakan bahwa Soeharto adalah anak tidak sah. Kertosudiro bukanlah ayah kandung Soeharto. Kemungkinan, ayah Soeharto adalah seorang pejabat tinggi. Teori ini menjawab mengapa Soeharto, yang katanya anak petani miskin, dapat bersekolah.

Terlepas dari apakah teori Elson benar atau tidak, bagaimanapun memang benar terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam cerita Soeharto. Alasan Soeharto menyampaikan cerita-cerita tersebut pada akhirnya kembali lagi pada ucapannya, yakni untuk mencegah tindakan dari pihak subversif dengan menggunakan informasi-informasi yang sifarnya kontroversial, mengganggu stabilitas nasional.

Dari segi pemikiran, sebelum Soeharto naik ke tampuk kepresidenan, ia tidak memiliki hal yang istimewa. Tidak ada hal yang spesial dari dimensi intelektual Soeharto semasa mudanya, seperti yang dituliskan Elson:

“Kita bisa dengan aman menganggap Suharto tidak suka membaca, tidak ada “ratusan buku anak-anak dan novel Belanda” seperti biasa dibaca

⁴ *Ibid.*, p. 30

⁵ *Ibid.*, p. 31

pemimpin nasionalis terkemuka, Sjahrir, di masa kecilnya. Tidak ada pula kalimat yang menyerupai klaim Sukarno, presiden pertama Indonesia, bahwa “waktuku habis untuk membaca.”⁶

Dari segi pendidikan, Soeharto tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Eropa. Karena bukan tipe pembaca, Soeharto tidak terpapar oleh pemikiran-pemikiran Barat seperti pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Pemikiran Soeharto lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa dan pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya.

Terdapat dua filosofi yang selalu dipegang teguh oleh Soeharto. Yang pertama adalah ajaran tiga “aja”, “*aja kagetan, aja gumunan, aja dumeh*”, (jangan kagetan, jangan heran, jangan mentah-mentang). Penulis menyimpulkan secara kasar bahwa ajaran-ajaran inilah yang menjelaskan karakter Soeharto yang terkesan misterius dan dingin. Filosofi yang kedua yakni, “*hormat kalawan Gusti, Guru, Ratulan wong atuwo karo*”, hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru, pemerintah, dan kedua orang tua.

Fase kehidupan Soeharto sebelum memasuki dunia politik ini penting untuk dibahas. Pada fase inilah karakter dasar Soeharto terbentuk. Hal-hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran dan sikapnya di masa depan. Pidato kenegaraannya akan menjadi salah satu bentuk hasil dari pengalaman dan pemikirannya. Seperti kehidupannya, pidato-pidato Soeharto bersifat sederhana. Menurut Roeder, segala tanda-tanda yang bersifat menghasut rakyat dengan hati-

⁶ *Ibid.*, p. 36

hati disingkirkan, sekalipun dengan resiko bahwa pidato itu tidak akan menarik untuk didengar.⁷

Meski begitu kita tidak bisa menelaah pemikiran Soeharto hanya melalui riwayat hidupnya semasa muda. Terjadi perubahan dalam diri Soeharto, seiring dirinya mengenal dunia politik. Hal ini akan dijelaskan lebih dalam di subbab-subbab berikutnya.

B. Keterlibatan PKI dalam Peralihan Kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru

Seperti yang telah disinggung di pendahuluan, peristiwa G30S merupakan pondasi bagi Orde Baru untuk berdiri. Dalam versi resmi pemerintahan Orde Baru, pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah PKI. Namun disamping versi resmi tersebut, banyak cendekiawan-cendekiawan yang mengemukakan teori-teori lain yang berusaha menjawab misteri peristiwa G30S.

Peristiwa G30S merupakan puncak dari pergumulan politik di Indonesia sepanjang tahun 1965. Terdapat dua kekuatan besar di Indonesia pada masa itu, yakni Angkatan Darat dan PKI. Sejak di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI mencapai kondisi-nya yang paling baik. Berkat kedisiplinan dalam menjalankan partainya, PKI berhasil menjadi salah satu kekuatan yang berpengaruh. Terlebih lagi, Presiden Soekarno mencetuskan ideologi Nasakom yang semakin memperkuat kedudukan PKI.

⁷ Roeder, *Op.Cit.*, p. 253. Penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 'menghasut' disini adalah kata-kata yang sifatnya menyulut emosi secara langsung. Contohnya seperti penggunaan kata-kata, "Ganyang Malaysia" dalam pidato-pidato Soekarno.

Meskipun begitu, pengaruh PKI terbatas dalam dimensi ideologis. Walaupun memiliki massa yang begitu besar, secara fisik, kekuatan PKI masih belum dapat menyaingi Angkatan Darat. Memang, PKI mendapat dukungan dari beberapa pihak dari dalam Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Namun Angkatan Darat tetap bukan tandingan keempatnya.

Pada awal tahun 1965, muncul gagasan untuk mendirikan Angkatan ke-5. Gagasan ini pada awalnya dicetuskan oleh Aidit, yang mengusulkan kepada presiden agar “buruh dan tani yang terorganisasi” dipersenjatai dan diberikan latihan-latihan kemiliteran. Presiden kemudian menamainya Angkatan ke-5.⁸ Dapat kita katakan bahwa gagasan tersebut merupakan usaha untuk menanggulangi kesenjangan kekuatan fisik antara Angkatan Darat dan PKI.

Angkatan Darat tentu saja menolak gagasan ini. Angkatan Darat mencari-cari alasan agar aktualisasi Angkatan ke-5 tidak benar-benar terlaksana. Menurut Yani dan Nasution, alih-alih mendirikan Angkatan ke-5, mereka lebih memilih untuk menerapkan UUD yang mewajibkan “setiap warganegara” untuk ikut serta dalam pertahanan negara. Jadi pimpinan Angkatan Darat menerima konsep ‘mempersenjatai kaum buruh dan tani’ dan juga seluruh “rakyat” dalam situasi yang benar-benar memaksa.⁹

Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani, melakukan aktualisasi pelatihan warga sipil di Lubang Buaya, di sekitar daerah pangkalan. Di kemudian hari, pada sidang pengadilannya tahun 1966, Omar Dhani mengatakan bahwa usul konkretnya untuk mempersenjatai kaum tani dan buruh terbatas pada melatih

⁸ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986), p. 91-92

⁹ *Ibid.*, p. 95

penduduk sipil yang tinggal di sekitar pangkalan udara untuk kewajiban penjagaan. Meskipun begitu, latihan tersebut dihentikan begitu Komodor Ignatius Dewanto mengetahui bahwa sukarelawan dalam latihan tersebut terutama diambil dari unsur komunis.¹⁰

Kesenjangan kekuatan fisik antara Angkatan Darat dan PKI tersebut, otomatis membuat satu-satunya pendukung PKI yang paling kuat hanyalah Presiden Soekarno. Permasalahannya adalah, Soekarno telah mencapai usia yang rentan. Kondisi kesehatannya berada dalam kondisi yang buruk. Apabila Soekarno meninggal, akan sangat mudah bagi Angkatan Darat untuk menyingkirkan PKI.

Pada Agustus 1965, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Posisi PKI semakin terancam. Ketegangan politik antara Angkatan Darat dan PKI semakin meningkat ketika isu mengenai Dewan Jendral yang telah berhembus sejak awal tahun semakin diyakini kebenarannya. Isu Dewan Jendral sendiri merupakan isu yang mengatakan bahwa di dalam tubuh Angkatan Darat terdapat sekumpulan jendral yang melakukan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan kudeta terhadap pemerintahan. Kebenaran isu ini masih diragukan hingga sekarang. Nampaknya yang meyakini kebenarannya hanyalah PKI. Sangat sedikit bukti yang mendukung isu ini.

Ketegangan politik di Jakarta memuncak pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari. Terjadi penculikan terhadap enam Jendral. Lima orang terbunuh dan satu orang, yakni Nasution berhasil melarikan diri. Pada 1 Oktober

¹⁰ *Ibid.*, p. 95-96

pagi, muncul siaran di radio yang mengumumkan bahwa telah terjadi Gerakan 30 September di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan batalion Tjakrabirawa. Misi dari gerakan tersebut adalah untuk menahan anggota-anggota Dewan Jendral yang bermaksud untuk melakukan kudeta. Dijelaskan bahwa pihak yang melakukan gerakan ini disebut dengan Dewan Revolusi. Disebutkan pula siapa saja yang berada dalam Dewan Revolusi tersebut. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah nama Soekarno tidak disebutkan dalam jajaran anggota Dewan Revolusi. Dalam siaran ini, peristiwa G30S terlihat seperti persoalan internal Angkatan Darat saja.

Di saat yang bersamaan pada 30 September malam, salah seorang perwira lain, yakni Soeharto, berada di Rumah Sakit bersama istrinya. Keduanya sedang menjaga anak lelakinya yang paling kecil, Tommy, yang mengalami kecelakaan kecil sebelumnya. Ia dan Tien aman berada di rumah sakit. Kenyataannya, Soeharto tidak termasuk dalam jajaran perwira yang ditangkap.

Pada 1 Oktober pagi, saat istirahat setelah pulang dari rumah sakit, seorang tetangga bernama Mashuri, membangunkan Soeharto dan memberitahunya tentang suara-suara tembakan yang terdengar di sekitar rumah Yani dan Nasution. Soeharto kemudian segera pergi ke pangkalan Kostrad. Ia mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat berkat absennya Yani, yang telah terbunuh semalam sebelumnya. Langkah-langkah Soeharto selanjutnya dijelaskan oleh Wanandi sebagai berikut:

“Sedikit demi sedikit Soeharto berhasil menguasai Lapangan Monas. Ia mengambil alih RRI pada pukul tujuh malam dan membacakan pidato pertamanya kepada bangsa Indonesia di dalam dan di luar negeri bahwa ia

menentang Dewan Revolusi. Beberapa anak buahnya di Kostrad, termasuk Ali Moertopo, berhasil meyakinkan satu batalion Brawijaya untuk melapor ke Kostrad dan Soeharto. Satu batalion lagi dari Diponegoro mundur ke Lanud Halim. Tindakan Soeharto memastikan bahwa usaha kudeta ini gagal.”¹¹

Dalam otobiografinya, Soeharto membantah isu adanya-nya Dewan Jendral. Dengan gamblang ia menyatakan kecurigaannya bahwa PKI-lah dalang di balik peristiwa G30S. Pernyataannya tersebut menjadi resmi setelah ia mengambil alih RRI dan menyampaikan pidato pertamanya di depan rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut dengan jelas Soeharto menyatakan bahwa PKI-lah yang telah melakukan perbuatan ‘biadab’ tersebut.

Pasca peristiwa G30S, Soekarno sebagai Presiden, mulai kehilangan pijakannya. Ia melakukan beberapa kesalahan berturut-turut yang membuatnya kehilangan dukungan dari masyarakat. Pertama, ia memberi pernyataan bahwa peristiwa G30S hanyalah sebuah riak-riak kecil dalam jalannya revolusi. Kemudian kedua, ia menolak tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Ketiga, ketika pembantaian besar-besaran terhadap PKI sedang berlangsung, Soekarno dengan marah memerintahkan untuk menghentikan pembunuhan massal itu. Ia mengatakan bahwa PKI merupakan salah satu golongan yang memiliki peran penting pada masa pergerakan dan kemerdekaan, bahkan melebihi kelompok-kelompok lain. Alih-alih membuat masyarakat menjadi tenang, sebaliknya sikap-sikap Soekarno ini membuat mereka semakin marah.

Ketika kemarahan massa tak dapat lagi dibendung dan Soekarno tetap menolak untuk mengambil tindakan terhadap PKI (yang telah dipercaya

¹¹ Yusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*, (Jakarta: Kompas, 2014), p. 45

masyarakat sebagai dalang peristiwa G30S), mulai terjadi pembunuhan massal terhadap PKI. Menurut Kasenda, pemberitaan yang terus menerus dilakukan media massa menimbulkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat yang membuat masyarakat secara psikologis siap membunuh orang-orang yang dianggap tergolong PKI.¹² Edman mendeskripsikan peristiwa pembantaian ini sebagai berikut:

“[...]keseluruhannya terdapat 500.000 orang yang dibantai yang banyak di antara mereka hanya memiliki keterkaitan yang amat kecil atau bahkan tidak terkait sama sekali dengan PKI[...]¹³

Sepanjang bulan Oktober 1965 hingga Maret 1966, terjadi “drama’ tarik-ulur kekuasaan antara Presiden dengan pihak Angkatan Darat. Soekarno berusaha keras untuk bersikap seakan-akan segalanya masih berada di bawah kendalinya, bahwa ia tetaplah Pemimpin Besar Revolusi. Angkatan-angkatan selain Angkatan Darat juga masih memberikan dukungan terhadap Soekarno. Ketiganya menolak gagasan Angkatan Darat sebagai pihak yang berkuasa.

Meskipun begitu, posisi Soekarno semakin terdesak. Keadaan tidak membaik dan pembantaian terhadap PKI terus berlangsung. Rakyat juga mulai kehilangan kepercayaan terhadap Soekarno, terlihat dari demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para Mahasiswa. Keadaan akhirnya berubah ketika Surat Perintah 11 Maret diturunkan. Soekarno “memerintahkan” Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas

¹² Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*, (Jakarta: Kompas, 2013), p. 28

¹³ Peter Edman, *Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), p. 213

pemerintahan dan revolusi, serta juga menjamin keselamatan pribadi Soekarno dan meneruskan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.¹⁴

Tindakan pertama yang diambil Soeharto sebagai pejabat Presiden adalah mengeluarkan perintah pembubaran PKI secara resmi. Sejak saat itu, segala hal yang berbau komunisme disingkirkan dari segala segi kehidupan di Indonesia. Bukannya tidak ada perlawanan dari apa yang tersisa dari PKI. Perlawanan-perlawanan tersebut dengan cepat ditangani oleh Angkatan Darat, tanpa adanya gejala yang berarti.

Sementara itu, posisi Soekarno telah bergeser dari pemegang kekuasaan tertinggi menjadi sekedar simbol pemerintahan. Soeharto sebagai pejabat presiden-lah yang menjalani peran sebagai kepala negara. Sebagai pejabat presiden, Soeharto mengucapkan pidato kenegaraannya pertama kali pada tahun 1967.

Sepanjang masa transisi kekuasaan, dalam setiap pidato kenegaraannya, Soeharto tidak pernah lupa untuk menyebut kembali peristiwa G30S. Tidak pernah bosan ia mengingatkan bahwa PKI adalah musuh negara yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas negara dan merupakan penyimpangan besar dari dasar negara Indonesia, Pancasila. Semua langkah yang diambil Soeharto menunjukkan bahwa ia berusaha menjadikan PKI sebagai contoh dari percobaan kudeta yang bodoh terhadap pemerintah. Ia ingin agar rakyat mengerti untuk tidak mengikuti jejak PKI.

¹⁴ Crouch, *Op.Cit.*, p. 209

Terlepas dari apakah PKI benar-benar dalang dari peristiwa G30S, Soeharto memanfaatkan situasi yang ada. Penulis sendiri menolak teori yang mengatakan bahwa Soeharto-lah otak dari G30S. Soeharto hanya berada di dalam tempat dan waktu yang tepat, dan ia mengambil kesempatan dari situasi tersebut.

Seperti yang telah disebutkan di subbab sebelumnya, Soeharto mengalami perubahan pada masa transisi ini. Sebelumnya, ia adalah sosok yang praktis, tidak pandai berpolitik. Namun, setelah setahun menjabat secara resmi dan mendapatkan saran dari berbagai pihak, Soeharto semakin mudah beradaptasi dalam berpolitik.¹⁵ Salah satu caranya untuk mencegah adanya pihak-pihak “subversif” adalah dengan menggunakan PKI sebagai contoh. Soeharto mungkin tidak peduli akan kebenarannya. Selama hal itu membantunya menjaga stabilitas politik, ia akan menggunakannya.

Pidato-pidato tentang PKI sebagai musuh negara dan Pancasila, mungkin tidak begitu banyak lagi disebutkan di tahun-tahun berikutnya. Pidato-pidato tersebut mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap pihak-pihak yang dekat dengan politik. Namun, bagi masyarakat awam, gagasan bahwa PKI adalah musuh negara, telah tertanam kuat. Gagasan tersebut terus berkembang melalui budaya, baik dari pendidikan, media massa, dan cerita dari mulut ke mulut. Tanpa masyarakat sadari, segala ucapan mengenai PKI, menjadi hal yang tabu, bahkan jauh setelah Orde Baru runtuh.

¹⁵ Seperti cetusan Wanandi dalam memoirnya: “Bagaimana dalam satu tahun Soeharto bisa menjadi begitu pintar berpolitik?” dalam Wanandi, *Op.Cit.*, p. 127

C. Konflik-konflik Pembawa Tonggak Kekuasaan Orde Baru

Pidato kenegaraan Soeharto, secara inti berisi mengenai laporan kerja selama satu tahun. Sebagian besar isinya membicarakan hal-hal teknis dan statistik mengenai perkembangan di Indonesia. Meskipun begitu di sela-selanya, terdapat hal-hal yang bersifat ideologis. Selipan-selipan dalam pidato ini-lah yang menjadi sorotan dalam tulisan ini.

Untuk memahami dimensi ideologis dalam Pidato Kenegaraan Soeharto, penting bagi kita untuk membahas beberapa peristiwa, kejadian, maupun kebijakan yang dianggap penulis penting pada masa Orde Baru. Di samping itu, hal-hal tersebut mempengaruhi konten dari Pidato Kenegaraan Soeharto.

a) Masa Transisi Kekuasaan

Pertama, adalah Masa Transisi (1966-1968). Masa Transisi adalah masa di saat Soeharto telah memegang kekuasaan secara eksekutif, tetapi secara resmi, Soekarno masih dianggap sebagai Presiden (secara simbolik). Masa ini merupakan tahun-tahun krusial bagi Pemerintahan Orde Baru. Soeharto harus bisa meyakinkan rakyat akan dirinya. Kemudian, masa ini juga merupakan pondasi bagi gagasan-gagasan yang akan membudaya selama lebih dari tiga dekade.

Mulai pada masa ini-lah PKI dibubarkan secara resmi. Pembersihan terhadap sisa-sisa PKI (termasuk di dalamnya pengadilan dan eksekusi) dilakukan pada masa ini. Kemudian, tidak lupa, peringatan akan PKI sebagai musuh negara dikumandangkan oleh media massa. Menurut Elson, walaupun gerakan komunis

secara praktis telah dihancurkan menjelang akhir 1968, namun “momok” PKI terus dibangkit-bangkitkan sesudahnya sebagai barang jualan Orde Baru.¹⁶

Di samping itu, pemerintah Orde Baru menekankan bahwa pemerintahan yang baru bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sebelumnya telah dinodai oleh paham Nasakom. Dalam sebuah pidato pada 15 April 1968, ia menegaskan bahwa “mencoba-mencoba menggunakan dasar negara yang lain dari Pancasila atau menyelewengkan pelaksanaannya, hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh bangsa seperti pengalaman pahit yang lalu”.¹⁷ Salah satu alasan mengapa terjadi dualisme kekuasaan pada masa ini, mungkin sebagai bentuk usaha pemerintah untuk memperlihatkan kepada rakyat, bahwa dalam situasi apapun, Indonesia akan tetap memegang teguh nilai Pancasila. Maka tidak dilakukan kudeta secara terang-terangan.

b) Rencana Pembangunan Lima Tahun

Rencana Pembangunan Lima Tahun atau yang disebut dengan Repelita merupakan jantung dari program kerja Pemerintahan Orde Baru. Repelita merupakan salah satu topik yang selalu dibahas dalam setiap Pidato Kenegaraan. Pembangunan merupakan proyek terpenting bagi Soeharto. Hal ini terlihat dari perubahan dalam sistem ekonomi dan politik sejak ia menjabat. Bertolak belakang dengan Soekarno, yang menentang hubungan politik dengan Amerika karena dianggapnya kapitalis, Soeharto justru memulai hubungan yang baik dengan

¹⁶ Elson, *Op.Cit.*, p. 334

¹⁷ *Ibid.*, p. 330

negara itu. Alasan utamanya adalah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunan.

Bagi Soeharto, hal yang terpenting bagi Indonesia bukan lagi revolusi. Menurutnya, yang diperlukan Indonesia adalah kekuatan untuk berdiri sendiri, menjadi mandiri. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembangunan secara besar-besaran. Untuk melaksanakannya, diperlukan kestabilan nasional.

Dalam salah satu pidato kenegaraannya, Soeharto melontarkan pertanyaan, mengapa baru setelah lebih dari dua dekade setelah kemerdekaan, pembangunan baru dapat berjalan? Jawabannya, karena sebelumnya, Indonesia terlalu sibuk mempertahankan dirinya secara fisik baik dari dalam maupun luar. Situasi di Indonesia sampai tahun 1965 tidak stabil. Soeharto terus mengatakan betapa pentingnya stabilitas nasional dan negara akan bersikap tegas bagi siapapun yang beniat mengusiknya. Pembangunan ekonomi menjadi legitimasi kekuasaan Orde Baru dan posisi dominan Soeharto.¹⁸ Dalam pidato tersebut Soeharto mengemukakan dua syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan yang salah satunya sebagai berikut:

“[...] adanya stabilitas nasional yang mantap, baik stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi. Orang tidak mungkin melaksanakan pembangunan apabila tidak dapat tenang memusatkan pikiran dan kemampuannya untuk pembangunan, karena selalu diganggu oleh keadaan yang goncang dan tidak menentu; apabila ia selalu disibuki dengan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi berbagai kericuhan dan pergolakan yang tak kunjung henti.”¹⁹

¹⁸ Kasenda, *Op.Cit.*, p. 62

¹⁹ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto, 15 Agustus 1974, p. 8

Maka tidak heran apabila Pidato Kenegaraan Soeharto dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan mengenai pembangunan yang bersifat pragmatis. Dapat kita katakan bahwa kira-kira 80% dari konten Pidato Kenegaraan Soeharto berhubungan dengan pembangunan.

c) Pemilu di Masa Orde Baru

Hal ketiga yang menjadi tonggak-tonggak penting pada masa Orde Baru adalah pelaksanaan Pemilu. Dalam panggung kekuasaan Orde Baru, Pemilu menjadi suatu hal yang pelaksanaannya dianggap penting oleh pemerintahan Orde Baru. Pemilu merupakan ‘wajah’ demokrasi Orde Baru. Disamping pelaksanaannya yang semakin lama semakin menjadi formalitas, pada akhirnya Orde Baru telah menjalankan demokrasi.

Pemilu pertama setelah pengangkatan Soeharto sebagai presiden secara resmi, dilaksanakan pada tahun 1971. Sejak pemilu ini-lah, Golongan Karya (Golkar) mulai naik daun. Sebelumnya, golongan ini dipandang sebelah mata karena reputasi-nya yang buruk. Tetapi, jika melihat latar belakangnya yang didirikan oleh Angkatan Darat, maka jelas mengapa Soeharto memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya.

Selama kampanye, Golkar menekankan unsur-unsur berikut: “Golkar adalah Pantja Sila, jadi janganlah anti-Golkar; Golkar adalah pemerintahan, yang memusatkan diri pada pembangunan, seperti mesjid indah itu, kantor bupati yang

megah itu, yang terbaik di Asia; Golkar adalah ABRI, jadi janganlah mengecam Golkar karena ABRI akan mengambil tindakan.”²⁰

Propaganda tersebut didukung oleh strategi pemerintah dengan mengatur suara yang diperbolehkan dalam pemilu. Contohnya saja, para tahanan politik yang masuk dalam kategori A, B, dan C tidak diizinkan untuk ikut memberi suara.²¹ Ali Murtopo berperan dalam melancarkan tekanan berat kepada para pejabat setempat agar mengamankan kuota jumlah suara yang sudah ditentukan di daerah-daerah.²² Sementara itu, Golongan Putih (Golput) yang berada di pihak oposisi, tidak diberikan izin pertemuan oleh pemerintahan. Singkat cerita, Pemilu 1971 merupakan suatu rekayasa yang menggiring Golkar ke arah kemenangan.

Setelah mengamankan posisi-nya pada Pemilu 1971, Golkar memastikan dirinya menyebar di setiap lapisan pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Jenkins:

“[...] para pemimpin Orde Baru memperkuat dan memperluas struktur administrasi militer yang paralel dengan sipil sampai ke bawah di tingkat desa. Hal ini memberikan basis lebih kokoh, saling berkait dan permanen dibandingkan apapun yang didasarkan pada kesetiaan pribadi yang bersifat sementara.”²³

Dalam pidato kenegaraannya pada 1971, Soeharto mengelu-elukan Pemilu yang telah dilaksanakan pada 3 Juli sebelumnya sebagai ‘Pesta Demokrasi’. Ia menekankan bahwa pemilu adalah wajah demokrasi Indonesia dan Orde Baru

²⁰ Ken Ward, *The 1971 election in Indonesia: an East Java case study* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1974), p. 85-86 dalam Elson, *Suharto*, p. 357

²¹ Elson, *Op.Cit.*, p. 356

²² *Ibid.*,

²³ David Jenkins, *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, (Depok: Komunitas Bambu, 2010), p. 22

telah melaksanakan tugasnya yang paling penting dengan terselenggaranya Pemilu tersebut. Kemudian, layaknya seorang Bapak yang ingin mendamaikan pertengkaran anaknya, ia mengingatkan bahwa kemenangan dan kekalahan itu hal yang biasa; “Nasib rakyat jauh lebih penting daripada menggunjingkan terus-menerus hasil Pemilihan Umum itu. Bekerja keras jauh lebih berguna daripada mengutak-atik hasil Pemilihan Umum yang sah itu”²⁴, ucapnya.

Dalam pemilu-pemilu selanjutnya, Soeharto tidak perlu lagi mengerahkan usaha yang terlalu berat, yang perlu dilakukannya adalah mengendalikan situasi agar tak ada lawan politik yang dapat melakukan oposisi terhadapnya. Setiap peristiwa yang dianggap mengganggu jalannya, akan dibungkam suaranya, seperti layaknya suara Mahasiswa.

d) Malam Petaka 15 Januari

Pada masa Orde Baru, Mahasiswa tidak termasuk dalam kategori masyarakat awam yang menerima begitu saja setiap langkah pemerintahan. Mahasiswa berperan penting dalam beberapa peristiwa. Salah satunya yakni dalam peristiwa Malam Petaka 15 Januari (Malari). Peristiwa yang terjadi pada awal 1974 inilah yang menggiring pemerintahan Orde Baru ke arah yang semakin represif. Malari secara general merupakan peristiwa kerusuhan, salah satu yang terbesar pada masa Orde Baru. Dari luar, yang nampak adalah demonstrasi oleh Mahasiswa terhadap pemerintahan yang dianggap korup. Mereka tidak menyukai keadaan ekonomi yang cenderung dekat dengan modal asing.

²⁴ Pidato Kenegaraan Preside Republik Indonesia Jenderal Soeharto, 16 Agustus 1971, p. 13

Keluhan-keluhan dari Mahasiswa sudah terdengar sejak 1969, tetapi kemarahan massa tersebut memuncak pada 15-16 Januari 1974. Pemicunya adalah kunjungan dari Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Secara simbolis, kunjungan ini menyatakan adanya penetrasi ekonomi Jepang ke perkotaan Indonesia dalam bidang-bidang seperti peralatan listrik dan kendaraan.²⁵

Kerusuhan ini menyebabkan kerusakan di pusat-pusat ekonomi di Jakarta, seperti Pasar Senen, serta dibakarnya *showroom* Astra Motor Corp. Tempat-tempat yang menjadi pusat kerusuhan adalah pusat-pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang produksi Jepang. Alasan mengapa orang Jepang menjadi target demonstrasi Mahasiswa karena orang Jepang dianggap tidak mampu berbaur dengan masyarakat, tidak dapat menyesuaikan diri dengan kultur dan jiwa orang Indonesia sehingga menjadi sasaran empuk bagi para Mahasiswa yang nasionalistis.²⁶ Walaupun itu hanyalah salah satu alasan faktor pendukungnya.

Meskipun begitu, Mahasiswa bukanlah satu-satunya aktor dalam peristiwa ini. Rupanya peristiwa Malari juga merupakan 'arena pertarungan' di antara para elite militer. Pertarungan antara dua kelompok dalam Angkatan Darat ini terjadi untuk mendapatkan perhatian Soeharto, atau mungkin posisinya.²⁷ Pertarungan tersebut sebenarnya telah berjalan sepanjang tahun 1969-1974, tetapi Soeharto berhasil menjinakkan pihak-pihak yang berseteru menggunakan pengaruh masuknya modal asing.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa sistem perekonomian Indonesia, sejak pemerintahan Orde Baru, cenderung dekat dengan modal asing.

²⁵ Elson, *Op.Cit.*, p. 393

²⁶ Wanandi, *Op.Cit.*, p. 138

²⁷ *Ibid.*,

Pelaksanaan kebijakan dalam bidang sektor-sektor penanaman modal asing sendiri berada di bawah pengaruh jenderal-jenderal yang memiliki kedudukan sebagai Asisten Pribadi (Aspri) presiden. Sistem yang dikenal dengan sistem pengayoman tersebut tentu menguntungkan banyak pihak di angkatan bersenjata, namun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kaum sipil.²⁸ Crouch menjabarkan:

“Masuknya modal asing secara besar-besaran membuka kesempatan bisnis baru yang luas bagi kaum militer bersama rekan-rekan sipil mereka, tetapi sekaligus juga mengancam posisi pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia yang miskin, baik dalam hal modal maupun koneksi dengan kalangan tentara.”²⁹

Ali Murtopo termasuk dalam barisan Aspri yang dianggap khalayak ramai sebagai pro-Jepang. Disisi yang lain, berdiri Sumitro sebagai Pangkobkamtib. Menjelang kedatangan Tanaka ke Jakarta, Sumitro mengambil tindakan-tindakan yang agaknya dimaksudkan untuk merugikan Ali Murtopo.

Sumitro mengasapi para Mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dalam kunjungan-kunjungannya ke Universitas-Universitas. Namun, justru ketika peristiwa Malari meletus, Sumitro-lah yang dianggap bertanggung jawab. Soeharto memecatnya dari jabatan panglima Kopkamtib. Selain Sumitro, beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab ditangkap dan dipenjara dalam waktu yang lama. Untuk mengalihkan perhatian publik dari pertengkaran antar

²⁸ Crouch, *Op.Cit.*, p. 349

²⁹ *Ibid.*,

elite tentara, pendukung partai-partai PSI dan Masyumi, serta sejumlah warga sipil yang dianggap subversif dituduh sebagai penyebab kerusuhan itu³⁰.

e) Koflik-konflik Seputar Upaya Perlindungan terhadap Pancasila

Pemerintahan Orde Baru tidak selalu bersikap represif seperti yang generasi masa kini ketahui. Sikap represif pemerintahan Orde Baru baru muncul ke permukaan sejak peristiwa Malari 1974. Soeharto menganggap bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini dapat menjadi gangguan bagi stabilitas nasional dan pembangunan, yang berujung dengan ternodainya Pancasila. Maka sejak itu pemerintahan Orde Baru secara perlahan mengambil tindakan-tindakan yang beralasan dengan tujuan untuk melindungi posisi Pancasila sebagai ideologi negara.

Pada tahun 1974, dilakukan Proses Penyederhanaan Partai dari 9 partai menjadi 3 partai. Pada saat itu, Orde Baru masih bersikap longgar terhadap ideologi-ideologi lain selain Pancasila, terbukti dengan diberikannya kesempatan pada PDIP dan PPP untuk berjalan, walaupun secara praktek, Golkar sendiri telah menancapkan kukunya di setiap tingkatan masyarakat.

Namun, hal ini semakin berubah memasuki tahun 1977. Terjadi gejala-gejala pada pemilu periode ini. Kelompok Islam menunjukkan kekuatannya dengan kemenangan PPP di beberapa daerah. Walaupun pada hasil akhir Golkar keluar menjadi pemenang, hal ini meningkatkan kewaspadaan Soeharto. Soeharto tampak memegang kendali penuh, meskipun tampak jelas bahwa Islam dengan

³⁰ *Ibid.*, p. 395

30% suara masih merupakan kekuatan politik yang tidak boleh diremehkan.³¹ Gejolak politik semakin menjadi ketika Soeharto dicalonkan kembali menjadi presiden. Terjadi demonstrasi oleh mahasiswa yang memuncak pada Januari 1978.

Mulailah terlihat jelas kerepresifan pemerintahan Orde Baru. Untuk menekan demonstrasi yang terjadi pada Januari 1978, pemerintah menempatkan kekuatan militer di kampus-kampus. Aksi mahasiswa di tahun ini, dapat dikatakan gagal. Soeharto sedang berada di titik puncak kekuasaannya dengan kuatnya dukungan dari militer. Soeharto-pun kembali dipilih oleh MPR sebagai presiden periode 1978-1982. Menyikapi demonstrasi tersebut, dan juga untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa Malari, dicetuskanlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus oleh Menteri Pendidikan yang baru, Daud Joesoef. Kebijakan ini menjadi salah satu simbol kediktatoran Orde Baru dengan dicabutnya media bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pendapatnya.

Masih pada tahun yang sama, rencana penyebaran doktrin Pancasila yang disebut P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) diberlakukan. Ketetapan ini dimaksudkan sebagai penuntun dan pegangan hidup untuk sikap tingkah laku bermasyarakat dan bernegara.³² Pada pidato-nya tanggal 1 Oktober 1978, di tahun pertama Hari Kesaktian Pancasila diperingati, Soeharto mengatakan:

“[...] mempertahankan Pancasila sama sekali tidak berarti hanya mengucapkan kesetiaan kepada Pancasila itu. Biar seribu kali sehari

³¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), p. 627

³² Kasenda, *Op.Cit.*, p. 91

mengucapkan kesetiaan kepada Pancasila, tetapi apabila Pancasila itu tidak kita amalkan, maka sama saja kita tidak berbuat apa-apa. Karena itu Pancasila harus diamalkan.”³³

Pada tahun 1978, Soeharto berhasil menyingkirkan pihak oposisi dan juga menyebarkan doktrin Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat. Namun, ternyata hal ini tidak bertahan lama. Pada Maret 1980, terjadi perdebatan publik tentang undang-undang pemilu baru, yang memicu seruan bagi adanya pemilu yang bebas dan memicu *walkout* orang NU dari DPR.³⁴ Kejadian *walkout* ini rupanya memancing kemarahan presiden. Hal ini dianggap Soeharto sebagai tanda bahwa kelompok Islam menolak Pancasila. Soeharto-pun mengekspresikan kemarahannya lewat dua pidato yang berbeda (Rapim ABRI dan HUT KOPASSANDHA). Dalam pidatonya dikatakan, kehadiran dirinya masih diperlukan, Islam ditengarai sebagai ancaman dan ABRI merupakan kekuatan yang dapat menjaga Pancasila.³⁵

Pidato-nya yang bernada congkak ini justru melahirkan suatu kelompok oposisi yang tak kalah buruk dari mahasiswa, kelompok Nasabri (Nasionalis, Agama, dan ABRI). Kelompok Nasabri muncul ke permukaan dengan mengeluarkan Petisi 50. Peristiwa ini bermula dengan dikeluarkannya “Pernyataan Keprihatinan” yang ditandatangani 50 orang tokoh-tokoh terkenal dalam masyarakat pada 13 Mei 1980. Petisi ini merupakan tanggapan, kritik, sekaligus

³³ Abdul Gafur, *Pak Harto: Pandangan dan Harapannya*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1987), p. 99

³⁴ M.C. Ricklefs, *Op.Cit.*, p. 639

³⁵ Kasenda, *Op.Cit.*, p. 99

pertanyaan-gugatan atas kedua podato presiden yang telah disebutkan sebelumnya.³⁶ Kasenda menjabarkan:

“Petisi itu menyatakan pidato Presiden Soeharto menimbulkan asumsi terjadinya polarisasi antara pihak yang “mempertahankan Pancasila” dengan pihak yang hendak “menggantikan Pancasila”. Polarisasi semacam itu dikhawatirkan menebarkan konflik baru di antara berbagai golongan sosial. Petisi ini menyatakan Soeharto telah menafsirkan Pancasila secara keliru dalam dua pidatonya. Soeharto menggunakan ideologi negara itu untuk menyerang lawan politiknya.”³⁷

Secara publik, peristiwa ini tidak berdampak terlalu banyak. Bagaimanapun juga Petisi 50 merupakan sebuah konflik elit yang mempertemukan Presiden (yang merepresentasikan negara) dengan sekelompok elit oposisi. Hal ini juga membuktikan seberapa besar kuasa Orde Baru atas pers, hingga peristiwa ini tidak disorot terlalu dalam untuk dijadikan konsumsi publik. Meskipun begitu, hal ini tetap merupakan ancaman bagi Soeharto.

Untuk menanggulangi kemunculan pihak oposisi baru ini, pemerintah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan caranya membungkam mahasiswa. Pemerintah menggunakan dua cara, yakni dengan menutup akses informasi dan yang kedua menjatuhkan ‘kematian perdata’ terhadap beberapa tokoh.³⁸ Upaya pembungkaman ini tidak berhasil sepenuhnya, karena pada tahun-tahun berikutnya, tokoh-tokoh yang termasuk dalam peristiwa Petisi 50 ini tetap melakukan oposisi-oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap buruk.

³⁶ Eep Saefulloh Fatah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok*, (Jakarta: Burungmerak Press, 2010), p. 220

³⁷ Peter Kasenda, *Op.Cit.*, p. 102

³⁸ Eep Saefulloh Fatah, *Op.Cit.*, p. 222-223

Namun, pemerintah berhasil meminimalisir dampak peristiwa ini di masyarakat luas.

Memasuki tahun 1983, sepertinya Soeharto semakin gelisah dengan pergerakan lawan-lawan politiknya. Ia memang telah berhasil menduduki kembali tampuk kepresiden setelah Pemilu 1982, namun pihak oposisi tetap membuatnya gelisah. Setelah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal sejak 1980, akhirnya ide ini terealisasi dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 pasal 3 bab IV demi memelihara, memperkuat, dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan bangsa.³⁹ Dengan ini secara resmi asas-asas lain seperti Islam dan Nasionalisme dihapuskan dari ideologi di Indonesia. Pancasila mencapai posisi tertingginya pada tahun ini. Partai-partai lain selain Golkar, khususnya PPP, terpaksa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. PPP mengganti asas Islam menjadi asas Pancasila. Kasenda menyatakan bahwa terdapat semacam ambisi untuk menyejajarkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar di dunia.⁴⁰ Pada akhirnya Pancasila merupakan suatu obsesi bagi pemerintahan Orde Baru.

Setelah segala konflik elite yang terjadi, pada 1984 konflik di ranah masyarakat muncul kembali ke permukaan, yakni terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini menandai adanya sentimen keagamaan yang muncul setelah Pancasila dijadikan asas tunggal.

Dari segi fakta sejarah, peristiwa ini memiliki banyak versi. Secara singkat, pada September 1984, terjadi bentrokan antara jamaah Musholla di Koja Selatan dengan aparat keamanan yang dianggap melakukan tindakan yang telah

³⁹ Kasenda, *Op.Cit.*, p. 106

⁴⁰ *Ibid.*, p. 112

melecehkan musholla. Keempat anggota masyarakat yang dianggap terlibat bentrok tersebut kemudian ditangkap. Sejumlah massa kemudian bersama dengan beberapa tokoh masyarakat, kemudian berbondong-bondong datang ke markas aparat keamanan, menuntut dilepaskannya keempat orang tersebut. Masyarakat meyakini bahwa keempat orang tersebut tidak bersalah. Penuntutan ini berujung dengan terjadi kerusuhan. Aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah massa yang menelan banyak korban jiwa dan luka-luka.

Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu kerusuhan terburuk pada masa Orde Baru. Hal ini ditetapkan bukan dilihat dari segi kerusakan, namun karena sentimen agama-lah yang telah memicu konflik tersebut. Masyarakat Islam sendiri telah bereaksi keras mengenai gagasan asas tunggal. Karena itu peristiwa ini dapat dikatakan sebagai realisasi kemarahan tersebut.

Peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan di atas nantinya akan mempengaruhi pidato-pidato kenegaraan Soeharto yang bertema ideologi. Dapat kita rasakan emosi dan sentimen yang tinggi terhadap Pancasila karena pada masa-masa itu Soeharto merasa kedudukan Pancasila terancam dengan munculnya pihak-pihak oposisi ke permukaan. Penjabaran mengenai hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam bab selanjutnya.

BAB III

PIDATO DAN HEGEMONI ORDE BARU

Dalam suatu pemerintahan negara, terdapat berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru salah satunya menggunakan kekuatan Hegemoni sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Secara teori, dalam pemerintahan demokrasi, masyarakat sipil memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara. Masyarakat sipil merupakan manifestasi dari negara itu sendiri. Pemerintahan Orde Baru, menciptakan suatu sistem di mana masyarakat sipil merasa memiliki pilihan, bahwa demokrasi memang nyata. Padahal secara praktis, demokrasi pada masa ini sebagian besar merupakan rekayasa.

Untuk meyakini suatu massa, yang diperlukan adalah konsep-konsep yang tepat untuk disebarkan. Diperlukan kata-kata dan istilah yang tidak bersifat provokatif tetapi efektif. Selain itu, hal-hal yang bersifat kontekstual juga harus disusun sedemikian rupa menjadi suatu runtutan pemikiran yang logis dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal-hal tersebut dapat dilancarkan secara efektif, salah satunya dalam pidato, dalam hal ini khususnya pidato kenegaraan. Karena itulah, pidato kenegaraan Soeharto dapat dianggap sebagai salah satu alat dalam melancarkan proses hegemoni negara.

A. Substansi Utama dalam Pidato Kenegaraan Soeharto

Pidato kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan adalah momentum yang datang hanya dalam satu tahun sekali. Satu hal yang membedakan pidato kenegaraan ini dengan pidato-pidato presiden yang lainnya adalah bahwa pidato ini berisi tentang ringkasan mengenai situasi di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. Situasi-situasi tersebut terbagi menjadi berbagai bidang seperti sejarah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan.

Berbeda dengan pidato-pidato pendahulu-nya, Soekarno, pidato Soeharto lebih terstruktur dan konsisten secara substansial. Substansi pidato-nya dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Meskipun begitu, dari segi emosi dapat kita temukan perubahan-perubahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Perubahan ini tidak mengubah isi pidato secara substansi, hanya saja mempengaruhi gaya bahasa serta makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Selama 30 tahun, yakni pada tahun 1967-1997, pidato kenegaraan Soeharto dirancang oleh beberapa *ghost writer*, seperti Djohan Effendi dan Yusril Izha Mahendra. Meski begitu, substansi dari Pidato Kenegaraan Soeharto tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Walaupun ditulis oleh *ghost writer*, konten-konten di dalam pidato kenegaraan Soeharto merupakan buah pikirnya sendiri. Yusril Izha Mahendra, yang pernah bertugas sebagai *ghost writer* pidato-pidato Soeharto pada era 90-an mengatakan, bahwa tidak seperti pidato-pidato presiden di momen-momen lainnya, penulisan pidato kenegaraan, dalam prosesnya

mendapatkan arahan-arahan tertentu dari Soeharto.¹ Ini berarti terdapat suatu ‘patokan’ materi di dalam Pidato Kenegaraan Soeharto. Subbab ini akan menjabarkan materi-materi inti tersebut. Dalam subbab ini akan dijabarkan materi-materi dalam pidato kenegaraan Soeharto yang terbagi dalam bidang sejarah, ideologi, dan politik. Dalam pidato kenegaraan Soeharto, satu topik yang mendapatkan banyak porsi adalah mengenai laporan pembangunan selama satu tahun. Namun, penulis memilih ketiga topik yang telah disebutkan karena tiga topik inilah yang paling dianggap relevan dengan konsep hegemoni. Kemudian dalam tiap pembahasan itu akan dijelaskan juga perubahan-perubahan apa yang terjadi secara kontekstual.

a) Sejarah

Kalimat “*Jangan sekali-sekali melupakan sejarah*” atau *Jas Merah* nya Soekarno nampaknya dihayati dengan cara yang berbeda oleh Soeharto. Sejarah merupakan salah satu topik yang cukup sering disinggung di dalam Pidato Kenegaraan, setidaknya sampai dengan awal tahun 1980-an. Memang, bila dibandingkan dengan pidato-pidato Soekarno, intensitas penjabaran sejarah di dalamnya tentu jauh lebih rendah. Sejarah sendiri dikatakan sebagai satu segi terpenting dalam kehidupan yang diperlukan manusia untuk dijadikan pembelajaran. Hal ini tetap menjadi tujuan penggunaan sejarah dalam pidato Soekarno maupun Soeharto. Namun, keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menggunakan sejarah.

¹ Youtube, *Yusril Izha Mahendra-Pengalaman Menulis Naskah Pidato Presiden*, <https://www.youtube.com/watch?v=7epG20-0qUg>, Diakses pada 15 November 2016. Peneliti sudah berusaha untuk menghubungi Yusril Izha Mahendra untuk diwawancarai, tetapi yang bersangkutan menolak.

Pidato Soekarno cenderung menggunakan sejarah sebagai bukti kehebatan-kehebatan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno adalah sosok figur yang mengeksplorasi sejarah Indonesia sebagai sesuatu yang bernilai positif. Setelah segala sesuatu yang menyerang Indonesia secara bertubi-tubi dari segi fisik maupun mental, pada akhirnya Indonesia tetap bertahan. Perihal ini dibahas dalam pidato Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tahun 1959.

“Pukulan-pukulan apa pun yang jatuh di atas tubuh kita di masa yang lampau, pukulan-pukulan yang mungkin telah meremukredamkan, menghancurleburkan bangsa-bangsa lain yang kurang kuat, kita toh tetap berdiri, kita toh tetap hidup, kita toh tetap *survive* [...]”²

Kemudian mengikuti satu kalimat di atas, Soekarno menyebutkan macam-macam ‘hantaman’ di masa lampau itu; aksi militer, federalisme Van Mook, krisis ekonomi karena pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, setelah semua hantaman-hantaman tersebut Indonesia tetap bertahan, dan bagi Soekarno itulah yang terpenting.

Agak berbeda dengan Soekarno, Soeharto justru membahas sejarah Indonesia tanpa keistimewaan tertentu. Berbeda dengan Soekarno, ia justru melakukan penjabaran-penjabaran sejarah untuk mencapai hal-hal seperti teror, ketakutan, dan kewaspadaan akan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Tujuan ini sangat bertolak belakang dengan pidato-pidato Soekarno yang justru ingin menimbulkan rasa percaya diri dalam diri pendengarnya. Seperti yang dikatakan oleh Hikmat Budiman bahwa salah satu prestasi Orde Baru adalah sejauh mana

² Tim Redaksi, *Jasmerah*, (Yogyakarta: PALAPA, 2013), p. 75

keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan sebuah trauma politik yang tetap terpelihara di kepala rakyat.³

Ciri-ciri penggunaan sejarah sebagai sesuatu yang digunakan untuk menimbulkan rasa takut dan waspada dalam diri rakyat, tergambar cukup jelas dalam pidato-pidato kenegaraan Soeharto salah satunya pada tahun 1981:

“Sebagai bangsa yang selalu ingin belajar dari pengalaman dari sejarahnya sendiri, kita tidak perlu menutup-nutupi kenyataan bahwa –[...] bahaya terhadap Pancasila itu memang ada dari pandangan-pandangan ekstrim kiri maupun kanan. Dan sampai sekarang pun kita belum dapat mengatakan bahwa bahaya terhadap Pancasila itu sudah tidak ada lagi.”⁴

Secara implisit, kalimat itu menyatakan bahwa bahaya dapat muncul ke permukaan kapan saja. Tentu hal ini dapat menghidupkan kembali trauma masyarakat, menimbulkan ketakutan akan terulangnya kembali peristiwa-peristiwa buruk seperti G30S dan pembantaian terhadap PKI. Alih-alih membuat masyarakat merasa tentram, kalimat-kalimat semacam ini-lah yang mengaktifkan ketakutan dan ketabuan akan hal-hal yang menyimpang dari paham Orde Baru. Dilihat dari perbedaan ini kita dapat kita lihat bahwa Soekarno menggunakan sejarah sebagai suatu refleksi, sejarah merupakan milik bersama. Sedangkan Soeharto cenderung menggunakan sejarah sebagai legitimasi kekuasaannya, dengan kata lain, sejarah merupakan milik penguasa.

Meskipun begitu terdapat perubahan-perubahan dalam pidato kenegaraan Soeharto selama 32 tahun Orde Baru berdiri. Cara Soeharto menggunakan sejarah sebagai alat untuk menyebarkan teror memang tetap sama, tetapi objek yang

³ Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), p. 135

⁴ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1981), p. 11-12

dituding olehnya berubah, sesuai dengan kondisi politik yang sedang dialami Indonesia saat pidato tersebut diucapkan.

Pada masa-masa awal Orde Baru setelah transisi kekuasaan presiden secara penuh kepada Soeharto, topik sejarah masih menjadi topik yang kaya pembahasannya. Soeharto menjabarkan sejarah Indonesia sejak tahun 1945. Penjabarannya ini berujung pada topik-topik yang terkait akan betapa menyimpangnya sistem Demokrasi Terpimpin dan betapa tercelanya G30S/PKI. Pola pembahasan ini bertahan hingga awal tahun 1970.⁵

Sejak tahun 1969, Orde Baru telah menancapkan pondasinya dengan lebih aman. Posisi Orde Baru telah lebih kokok. Mulai terlihat pergeseran-pergeseran prioritas dalam menjalani pemerintahan, dan hal ini tercermin pula dalam pidato-pidato kenegaraan Soeharto sejak 1970-an. Ia tak lagi repot-repot menjabarkan sejarah Indonesia secara lengkap. Sepanjang dekade 1970-an, pembahasan yang terkait topik sejarah lebih terfokus kepada penyimpangan-penyimpangan sistem Demokrasi Terpimpin dan tragedi G30S. Ide-ide itu dapat kita lihat dari penggalan Pidato Kenegaraan Soeharto dibawah:

“Pemusatan kekuasaan semacam ini, lebih-lebih tanpa kontrol efektif darimana-pun telah mengakibatkan berbagai akibat negatif yang sangat luas, mengakibatkan penyalah-gunaan kekuasaan dan matinya inisiatif masyarakat dan telah memberikan lapangan yang luas dan subur bagi gerakannya PKI yang tidak saja menghambat usaha pembangunan negara, tetapi membahayakan tegaknya Pancasila dan menginjak-injak azas-azas demokrasi.”⁶

⁵ Lihat lampiran 2

⁶ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1968), p. 9-10

Memasuki era tahun 80-an, tudingan-tudingan terhadap PKI sebagai pihak subversif semakin berkurang. Begitu juga dengan pembahasan-pembahasan sejarah. Terjadi pergeseran prioritas yang merubah objek tudingan tersebut kepada yang disebut kelompok ekstremis kanan. Sejak itulah pembahasan-pembahasan terkait dengan sejarah tidak mendapat begitu banyak porsi lagi di dalam pidato kenegaraan Soeharto. Seperti yang disebutkan oleh Hooker, bahwa pidato-pidato Soeharto sangat berbeda dengan pidato Soekarno yang lebih terfokus pada aksi dan kondisi di masa lalu dibanding perumusan-perumusan rencana dan petunjuk untuk masa depan.⁷

Diluar pidato kenegaraan sendiri, sejarah bukan suatu hal yang dianggap sepele, sebaliknya pemerintahan Orde Baru mengerti bahwa sejarah dapat menjadi alat dalam menyebar hegemoni, menggunakan pendidikan dan pers sebagai media-nya. Menggunakan kekuatan pers, melalui stasiun televisi nasional, pemerintah mewajibkan pemutaran film G30S/PKI. Film ini menegaskan bahwa perspektif dalam film tersebut merupakan sejarah resmi. Melewati pendidikan juga ditulis sejarah resmi mengenai G30S yang diajarkan di sekolah sebagai sejarah resmi. Maka, tidak masalah jika Soeharto tidak terlalu banyak membahas hal ini dalam pidato-pidatonya. Pemerintah memastikan bahwa ide-ide ini tetap tersebar, menggunakan media-media lain.

⁷ Virginia Martheson Hooker, *Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru dalam Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), p.61

b) Ideologi

Dari semua topik dalam pidato kenegaraan Soeharto, topik inilah yang menjadi sorotan utama dalam karya tulis ini. Walaupun dari segi kuantitas, pembahasan yang terkait ideologi tidak sebanyak topik-topik yang terkait dengan pembangunan, tetapi justru emosi di dalam pidato Soeharto paling menonjol dalam pembahasan-pembahasan yang terkait dengan ideologi. Pembahasan-pembahasan terkait pembangunan, setidaknya sampai dengan pertengahan tahun 80-an, terkesan formal dan cenderung merujuk pada data-data kuantitatif.

Apabila kita membicarakan ideologi pada masa Orde Baru, maka satu hal kata yang muncul dalam pikiran adalah ‘Pancasila’. Salah satu tujuan pemerintahan Orde Baru adalah untuk mengembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam setiap segi kehidupan di Indonesia. Hal ini terlihat dengan digunakannya Pancasila dalam setiap kesempatan ketika pemerintah sedang menghadapi suatu masalah seperti Malari, demonstrasi penolakan kembali pencalonan Soeharto, Petisi 50, dan peristiwa Tanjung Priok. Tujuan ini bukan hanya sekedar kalimat formal yang diucapkan setiap upacara bendera atau tertulis di atas kertas putih. Pemerintahan Orde Baru mengambil langkah-langkah serius untuk mencapai tujuan tersebut, dan hal itu tergambar jelas dalam setiap pidato kenegaraan Soeharto.

Seperti topik-topik mengenai sejarah, topik terkait ideologi juga mengalami perubahan-perubahan, yang bahkan jauh lebih signifikan di dalam pidato kenegaraan. Pada tahun 60-an akhir, topik-topik mengenai ideologi sendiri erat kaitannya dengan topik sejarah. Maksudnya erat dengan topik sejarah adalah

berkaitan dengan penyimpangan dalam Demokrasi Terpimpin serta peristiwa G30S. Kalimat yang bermakna kurang lebih sama, sering diucapkan dalam pidato tahun 1967-1969: “Jaman baru ini intinya adalah: pemurnian kembali cita-cita kemerdekaan, pelurusan kembali jalannya sejarah kita, pelaksanaan kembali Pancasila dan UUD 1945.”⁸ Pada periode ini, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu setelah keretakan yang timbul pada masa Demokrasi Terpimpin.

Memasuki tahun 70-an, peran Pancasila semakin besar. Pancasila sebagai ideologi negara semakin disorot sejak Pemilu tahun 1971. Pemilu menjadi momen penting untuk mengingatkan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara dan harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ideologi selain Pancasila sebaiknya tidak terlalu menonjol karena dianggap menyempitkan diri dengan ideologi golongannya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Pidato Kenegaraan tahun 1971: “[...] saya tidak jemu-jemu menganjurkan agar golongan-golongan dalam masyarakat atau partai-partai politik hendaknya jangan menyempitkan diri dengan ideologi golongannya sendiri.”⁹ Kalimat-kalimat seperti ini dapat kita lihat sebagai upaya agar masyarakat lebih terfokus pada golongan-golongan yang ber-ideologi Pancasila.

Upaya ini kemudian didongkrak oleh kebijakan Pembinaan Partai tahun 1974, yang disebut Proses Penyederhanaan Kehidupan Partai. Proses pembinaan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesempitan ideologi golongan.¹⁰ Bila kita perhatikan, penerapan Pembinaan Partai ini dapat dikatakan sebagai upaya lainnya

⁸ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1969) , p. 5

⁹ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1971) , p. 9

¹⁰ Lihat lampiran 3

untuk memfokuskan perhatian pada satu golongan saja pada pemilu berikutnya, yakni Golkar.

Sejak peristiwa Malari tahun 1974, kita dapat melihat perubahan-perubahan dalam pidato Soeharto, khususnya dalam topik-topik yang berkaitan dengan Pancasila. Bahasa yang digunakan Soeharto jauh lebih lugas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada pidato tahun 1974 itu pula Soeharto menampik bahwa penerapan Pembinaan Partai ada kaitannya dengan Peristiwa Malari. Ia juga menolak gagasan bahwa hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan masyarakat. Kalimat ini jelas merupakan kalimat pembelaan kepada pihak-pihak yang menuding pemerintah sebagai pemerintahan yang otoriter.

Masih dalam pidato yang sama, Soeharto menyinggung isu terkait *Bhinneka Tunggal Ika*, khususnya terkait dengan keragaman agama di Indonesia. Secara sekilas, pembahasan ini dibalut oleh himbauan untuk meresapi kembali kalimat *Bhinneka Tunggal Ika*. “Menghapuskan perbedaan merupakan kemustahilan, karena itu hendaknya kita hidup dalam beragam warna, tanpa satu warna-pun yang mencolok.” Di dalam balutan itu, tersembunyi Pancasila. Tidak ada satu warna-pun yang boleh mencolok karena pada akhirnya Indonesia merupakan negara Pancasila.

Soeharto mengatakan, “Negara kita bukanlah negara agama,” –kemudian diikuti dengan kalimat yang lebih halus– “bukan negara yang mendasarkan diri pada agama tertentu saja”.¹¹ Kalimat tersebut sesungguhnya tertuju pada

¹¹ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1974), p. 21

kelompok Islam. Hubungan baik antara umat dan negara telah berakhir sejak tahun 1969, memasuki tahun 70-an mulai terjadi kerenggangan. Kerenggangan ini semakin kentara mulai akhir Juli 1973 yang ditandai oleh kontroversi di seputar RUU Perkawinan.¹² Karena itu isu-isu terkait agama juga mulai muncul di permukaan Pidato Kenegaraan.

Setelah melewati krisis Malari, isu-isu mengenai Pancasila kembali memuncak pada tahun 1978. Memasuki periode pemerintahan yang baru, Soeharto menjelaskan suatu rancangan tujuan pembangunan yang disebut dengan Sapta Krida. Ia menjabarkan makna-makna dari krida-krida tersebut, salah satunya krida kelima yang berbunyi: “terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh” yang dilandasi oleh “Pedoman Penghayatan dan Pangamalan Pancasila” (P4).

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, Soeharto menganggap pengulangan sumpah setia terhadap Pancasila tidak berarti bila tidak diamalkan. Dalam pidato kenegaraannya tahun 1978, Soeharto memberikan pengertian mengenai P4 dan juga penjabaran dalam upaya meyakinkan pendengarnya, bahwa eksistensi P4 sangatlah penting.

Lagi-lagi Soeharto mengungkit isu kemajemukan bangsa. Menurutnya, kemajemukan bangsa yang diiringi dengan pembangunan akan meningkatkan dinamika masyarakat. Istilah “dinamika masyarakat” di sini dapat bermakna banyak. Namun, melihat konteks topik tersebut, “dinamika masyarakat” yang dimaksudkan di sini lebih merujuk kepada bentrokan antar masyarakat majemuk

¹² Eep Saefullah Fatah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, (Jakarta: Burungmerak Press, 2010), p. 232

tersebut, yakni antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Karena itu, untuk meminimalisir bentrokan antar kelompok tersebut, sangat penting eksistensi P4 itu.

“Dalam rangka ini maka penghayatan dan pengamalan Pancasila amat mendesak, karena pandangan hidup kita yang berdasarkan Pancasila inilah yang mampu mempersatukan cita-cita dan menjadi semen pengikat bangsa kita yang sangat majemuk ini[...]¹³”

Setelah peresmian penerapan P4 pada 1978, pada pidato-pidato selanjutnya, penekanan terhadap pentingnya Pancasila semakin terasa. Soeharto menegaskan kembali secara konsisten bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pedoman nilai dan norma yang diakui di Indonesia. Karena itu paham-paham lain seperti individualisme, liberalisme, dan totalitarisme tidak akan diberikan tempat dalam pemerintahan Orde Baru.¹⁴ Gagasan yang berasal dari masyarakat lain tidak dapat dijadikan patokan karena belum tentu sesuai dengan cita-cita dan semangat kekeluargaan Indonesia. Kita dapat menemukan kalimat-kalimat yang hampir serupa diulang kembali dalam pidato-pidato lain di tahun berikutnya, salah satunya pada tahun 1984.¹⁵

Meskipun begitu, upaya Soeharto dalam menekankan Pancasila sebagai satu-satunya asas mulai mengendur sejak Pancasila benar-benar ditetapkan sebagai asas tunggal secara resmi pada 1983. Nampaknya, ia sudah bisa bernafas lega. Tudingan-tudingan terhadap kelompok ekstrim kiri dan ekstrim kanan akan

¹³ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 1978), p. 27

¹⁴ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1979), p. 8

¹⁵ Lihat lampiran 4

adanya upaya menghapuskan Pancasila sebagai ideologi negara semakin jauh berkurang. Kasenda mengatakan:

“Suara Soeharto mengenai Pancasila, sebagaimana dikatakan Douglas E Ramage, telah berubah setelah dicanangkannya asas tunggal. Kini tidak ada lagi pidato-pidato seperti yang diucapkan Soeharto pada tahun 1980 yang memancing protes keras[...] Sebaliknya Soeharto berbicara mengenai Pancasila sebagai “ideologi terbuka” dan kini tidak lagi tegas dalam Pancasila.”¹⁶

Pada tahun-tahun selanjutnya, Soeharto tetap konsisten menjabarkan topik-topik mengenai Pancasila dalam memenuhi kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan. Seperti yang dikatakan Kasenda, Soeharto tidak lagi terlalu tegas dalam membicarakan Pancasila, bahkan dapat kita temukan adanya sikap-sikap yang cenderung lembut bagi pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah, seperti dalam pidato kenegaraannya tahun 1985 dan 1987.¹⁷

“Saya menghargai pandangan-pandangan dari manapun yang bertujuan untuk memikirkan secara bertanggungjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Namun adalah lebih bijaksana dan lebih mengenai tujuannya apabila pandangan itu dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu akibat-akibatnya yang negatif, sebelum dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat.”¹⁸

Setelah Soeharto berhasil menundukkan lawan-lawan yang dianggap membahayakan Pancasila, pidatonya terkesan seperti formalitas dan repetitif. Emosi dalam pidato-pidato kenegaraannya mulai terasa lebih bijaksana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

¹⁶ Peter Kasenda, *Op.Cit.*, p. 110

¹⁷ Lihat lampiran 5

¹⁸ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1987), p. 22

c) Politik

Segala hal mengenai Orde Baru berkaitan erat dengan Pancasila. Bahkan dalam pidato-pidato kenegaraannya, terlihat upaya untuk membawa Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Maka bukan merupakan kebetulan jika setiap pembahasan politik di dalamnya juga berkaitan erat dengan topik-topik mengenai Pancasila.

Dalam beberapa pidato kenegaraan, topik mengenai politik biasanya terbagi dua: politik dalam negeri dan politik luar negeri.¹⁹ Hal yang menarik adalah, pidato kenegaraan Soeharto justru lebih banyak membicarakan politik luar negeri secara detail dibandingkan politik dalam negeri.

Terdapat kecendrungan untuk menghindari pembahasan topik-topik politik dalam negeri terlalu dalam. Dalam pidato-nya tahun 1968, dengan jelas terlihat adanya upaya depolitisasi politik dalam kalimat berikut: “Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya beramai-ramai berbicara soal politik saja.” Kalimat ini mengacu pada era pemerintahan Soeharto ketika setiap kalangan dalam masyarakat mencurahkan seluruh perhatiannya kepada politik. Hal ini menyebabkan terbengkalainya pembangunan ekonomi.²⁰

Tujuan depolitisasi politik sendiri sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari sisa gejala politik kepada semangat pembangunan. Hal ini secara implisit terlihat dalam pidato-pidato pertama, dari tahun 1967 hingga awal 1970-an. Meskipun begitu, upaya Soeharto dalam menghindari pembahasan

¹⁹ Namun, seperti yang telah dijelaskan dalam pembatasan masalah, tulisan ini hanya akan fokus dalam topik-topik dalam negeri saja.

²⁰ Lihat lampiran 1

politik yang terlalu dalam tetap konsisten dalam pidato kenegaraan di tahun-tahun selanjutnya, bahkan dalam situasi-situasi politik yang sedang bergejolak.

Momentum-momentum tertentu seperti Pemilu merupakan masa yang sulit untuk mempertahankan proses depolitisasi politik. Terlebih lagi pada tahun 1971 belum diberlakukan penyederhanaan partai.²¹ Karena itu dalam pidato kenegaraan tahun 1971, Soeharto menghimbau masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan lagi masalah-masalah pemilu yang sudah lewat. Soeharto mengatakan, “Nasib rakyat jauh lebih penting daripada menggunjingkan terus menerus hasil Pemilihan Umum itu. Bekerja keras jauh lebih berguna daripada mengutak-utik hasil Pemilihan Umum yang sah itu.”²² Kalimat itu mengindikasikan adanya pertentangan-pertentangan pasca Pemilu, karena itu Soeharto menyatakan bahwa pertentangan-pertentangan tersebut tersebut tidak ada gunanya. Hal itu tidak akan mengubah apapun karena hasil Pemilu adalah hasil yang sah, terlepas dari permainan politik apapun.

Berbeda dengan pemilu pertama ini, dalam pidato kenegaraan pasca pemilu di tahun-tahun berikutnya, tak ada lagi kalimat-kalimat semacam itu. Golkar, sebagai representasi dari pemerintahan Orde Baru telah mengamankan posisi-nya. Dwifungsi ABRI memastikan, bahwa kekuatan Golkar telah menyebar di seluruh tingkatan. Di samping itu, dengan dilakukannya penyederhanaan partai, mempersempit ruang lingkup perdebatan politik. Pemilu-pemilu selanjutnya terkesan seperti formalitas saja. Pemilu sendiri dalam pidato kenegaraan didefinisikan sebagai tugas dalam mengamalkan Pancasila. Keformalitan

²¹ Penyederhanaan Partai dilakukan pada tahun 1974 yang disebut dengan fusi partai. Partai-partai Islam difusi dalam PPP sedangkan partai-partai kristen difusi dalam PDIP.

²² Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1971), p. 13

Pemilu tersebut juga tergambar dalam pidato kenegaraan tahun 1977, dengan tidak begitu dalamnya pembahasan mengenai Pemilu, selain mengelukannya sebagai pesta demokrasi yang patut dibanggakan.

Selain Pemilu, era Orde Baru memasuki satu dekade yang sulit dan penuh gejolak politik dari tahun 1974-1984. Secara eksplisit hal ini tidak tergambar jelas dalam pidato-pidato kenegaraan. Soeharto berhati-hati untuk tidak terlalu dalam membahas gejolak-gejolak politik tersebut, namun secara halus ia menyisipkan pesan-pesan yang mengarah pada peristiwa-peristiwa penting itu. Hal-hal implisit seperti ini diharapkan untuk tidak tertangkap oleh massa akar rumput, yang tidak terlalu dekat dengan kehidupan politik.

Seperti misalnya, pada pidato kenegaraan tahun 1974, Soeharto hanya sedikit menyinggung Peristiwa Malari. Hanya terdapat kalimat-kalimat yang mengindikasikan adanya dalang dibalik peristiwa Malari. Namun, subjek yang dituding tidak jelas siapa, entah Mahasiswa-kah atau individu-individu dalam kekuatan militer yang berseteru. Masih dalam pidato yang sama, Soeharto membantah ide yang menyatakan bahwa penerapan penyederhanaan partai memiliki kaitan dengan peristiwa Malari. Hal ini menunjukkan bahwa baik bantahan tersebut maupun minimnya pembahasan mengenai Malari sesungguhnya merupakan suatu bentuk penolakan adanya ketidakstabilan dalam pemerintahan Orde Baru. Disamping itu, dengan minimnya pembahasan-pembahasan mengenai gejolak politik, menjaga untuk mempertahankan sistem massa mengambang.

Gejala-gejala yang sama terlihat dalam pidato-pidato kenegaraan pada tahun-tahun penting seperti saat aksi penolakan mahasiswa terhadap pencalonan

kembali Soeharto sebagai presiden (1977), Petisi 50 (1980), hingga peristiwa Tanjung Priok (1984). Indikasi adanya peristiwa-peristiwa tersebut hanya terasa secara implisit dalam beberapa paragraf seakan-akan peristiwa-peristiwa ini tidaklah penting.

Topik-topik politik, dari pertengahan tahun 80-an hingga akhir 90-an memiliki nasib yang hampir sama dengan topik-topik sejarah, tidak memiliki banyak porsi lagi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melakukan depolitisasi politik. Politik dijadikan barang mewah yang terlalu rumit untuk dipahami masyarakat.

B. Politik Wacana dalam Pidato Kenegaraan Soeharto

Panggung politik Orde Baru tidak jauh dari apa yang disebut dengan politik wacana. Terdapat tiga gejala bahasa dalam politik wacana tersebut. Pertama, dengan menciptakan singkatan-singkatan dan akronim tertentu; Kedua, melakukan eufemisme atau penghalusan bahasa; dan Ketiga, disfemisme atau pengkasaran bahasa.²³ Ketiga cara ini digunakan secara konsisten, salah satunya dalam pidato kenegaraan Soeharto, untuk menanamkan ide-ide yang diperlukan pemerintah, ke dalam pikiran masyarakat. Berbagai istilah politik muncul pada masa Orde Baru seperti; “anti-pembangunan”, “ekstrem kanan”, “ekstrem kiri”, “gangguan keamanan”, atau “subversi”, yakni istilah-istilah yang sifatnya

²³ Daniel Dakhidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 361

memecah.²⁴ Pidato kenegaraan Soeharto menjadi *ladang* yang tepat dalam praktek politik wacana Orde Baru.

Penggunaan bahasa merupakan suatu hal yang krusial dalam sebuah tatanan pemerintahan. Setiap wacana yang muncul akan menjadi sorotan oleh masyarakat. Ketiga gejala bahasa politik di atas membantu pemerintah untuk mengendalikan apa yang beredar di kalangan masyarakat. Bagaimana-pun, sesuatu yang tidak dipikirkan dan diucapkan secara publik, tidak akan menjadi budaya.

Gejala bahasa politik yang pertama yakni penggunaan akronim. Akronim sendiri merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Penggunaan bahasa yang diakronimkan sangat merebak pada masa Orde Baru. Penggunaan akronim tanpa disadari sangat efektif karena mudah melekat diingatan publik. Salah satu akronim yang diciptakan pada masa Orde Baru dan masih melekat pengucapannya hingga masa ini yaitu *pemilu* (pemilihan umum).

Dua gejala bahasa politik yang berikutnya, eufemisme dan disfemisme, dianggap sebagai gejala bahasa yang berkonotasi buruk sehingga sering menuai kritik. Menurut Dakhidae, sifat dasar eufemisme dan disfemisme sendiri, sebenarnya tidaklah buruk. Dalam setiap bahasa dan budaya mana-pun eufemisme dan disfemisme biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seperti misalnya, alih-alih menyebutkan “pergi ke-WC”, orang lebih suka menyebutkan “pergi ke *belakang*”. Sering juga kita mendengar kata-kata seperti, “Bisa *habis lo* sama guru

²⁴ Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), p. 39

galak itu kalau *ketangkep*”, karena kata “habis” menjelaskan situasinya secara lebih intens dibandingkan kata “dihukum”. Eufemisme tidak menipu meskipun ia melunakkan gejala ekonomi-politik, begitu pula disfemisme, meskipun ia meningkatkan intensitas kenyataan itu sedikit.²⁵

Walaupun dalam Bahasa Politik Orde Baru terdapat tiga gejala, namun dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus kepada gejala eufemisme dan disfemisme. Berbeda dengan bahasa lisan sehari-hari ataupun artikel dalam surat kabar, pidato kenegaraan menggunakan bahasa yang lebih formal, sehingga penggunaan akronim-akronim lebih diminimalisir.

Terdapat pola-pola tertentu dalam penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam pidato kenegaraan Soeharto. Misalnya, eufemisme digunakan dalam topik-topik yang sifatnya melindungi pemerintah dari pandangan yang negatif. Dhakidae menyebutkan penggunaan kalimat “semen *menghilang* dari pasaran” pada masa Orde Baru. Padahal, apabila diteliti lebih dalam, kalimat yang lebih tepat adalah “produksi semen dikurangi oleh pemerintah”. Bagaimana mungkin semen menghilang bila produsen terbesar semen adalah pemerintah sendiri?

Pengurangan produksi semen tersebut sengaja dilakukan untuk menaikkan harga-nya di pasaran. Namun, mengakui tindakan ini secara terang-terangan jelas tidak mungkin dilakukan karena akan menimbulkan pandangan negatif serta kritik terhadap pemerintah. Pemerintah akan dianggap seenaknya menaikkan harga. Untuk menghindari hal itu, kata-kata “pengurangan produksi” di-eufemismekan menjadi “menghilang”.

²⁵ Dakhidae, *Op.Cit.*, p. 398

Gejala penggunaan eufemisme terlihat dalam pidato kenegaraan Soeharto pada tahun 1974 dalam konteks pembinaan kepartaian. Partai politik yang lebih dari dua tahun sebelumnya berjumlah sembilan, dibagi menjadi dua kelompok saja yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.²⁶ Diluar itu ada pula Golkar. Perubahan dalam pembinaan kepartaian itu disebut sebagai “proses penyederhanaan kehidupan kepartaian”. Tujuan *penyederhanaan* ini adalah untuk menghindari adanya kesempitan ideologi golongan-golongan tertentu seperti guru, pegawai negeri, buruh, tani dan nelayan, mahasiswa, pemuda, dan lainnya.

Kata *penyederhanaan* dalam konteks ini dapat diasumsikan sebagai kata yang telah di eufemisme-kan dari kata-kata alternatif lainnya seperti pembubaran, penutupan, atau pemberangusan. Alasan “menghindari adanya kesempitan ideologi” tersebut justru telah terjadi. Masih dalam konteks yang sama, Soeharto menyebutkan: “semua partai sebagai partainya rakyat Indonesia dengan sendiri memiliki satu ideologi nasional – ialah Pancasila”.²⁷ Kita perlu menggaris bawahi kata “satu” dalam kalimat tersebut. Makna “kesempitan ideologi” yang disebutkan setelahnya menjadi kabur.

Secara general, semakin sedikit atau semakin kecil jumlah sesuatu, maka hal tersebut berbanding lurus dengan konsep “sempit”. Karena itu, untuk menghindari pemikiran “satu ideologi = sempit”, digunakanlah kata *penyederhanaan*. Sebaliknya, kata “sempit” digunakan dalam konteks jumlah ragam ideologi yang dianggap terlalu banyak namun, *lucunya*, juga dianggap

²⁶ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1974), p. 16

²⁷ *Ibid.*, p. 17

sempit. Fenomena ini sesuai dengan kalimat Dhakidae bahwa ada tirai ideologi yang membiaskan semuanya, sehingga terbalik-balik.²⁸

Penggunaan istilah lain yang juga memiliki gejala eufemisme disebutkan dalam Pidato Kenegaraan tahun 1978 yakni “keselarasan”. Soeharto berujar, “Lebih dari sekedar kebebasan, inti demokrasi saya rasa, adalah *keselarasan*”. *Keselarasan* yang bagaimanakah yang dimaksud dalam pidato ini? Kata *keselarasan* disini, erat kaitannya dengan konsep lain yang juga kerap disebutkan semasa Orde Baru; demokrasi yang bertanggung jawab. Lagi-lagi terdapat paradoks di antara kedua konsep itu.

Demokrasi sendiri berarti sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Kebebasan berpendapat merupakan jantung dari demokrasi itu sendiri. Namun, persamaan pendapat merupakan hal yang mustahil dalam proses demokrasi. Jadi makna *keselarasan* yang disebutkan dalam pidato ini mungkin bermakna sama sekali berbeda. Kata *keselarasan* disini kemungkinan adalah eufemisme dari istilah-istilah seperti “sama rata” atau lebih ekstrim lagi “seragam”. Disitulah letak paradoks dari konsep-konsep tersebut, ketika suatu negara dikatakan memiliki sistem demokrasi tetapi pendapatnya “berseragam”. Maka untuk menghindari inkonsistensi yang mencolok, digunakanlah kata *keselarasan*. Kata *keselarasan* dalam konteks ini sesungguhnya berhubungan erat dengan salah satu Trilogi Pembangunan, yakni Stabilitas Nasional yang dinamis. Tujuan dari *keselarasan* yang disebut-sebut disini adalah untuk mencapai

²⁸ Dhakidae, *Op.Cit.*, p. 401

Stabilitas Nasional, karena tanpa adanya *keselarasan* atau *penyeragaman* pikiran, maka akan muncul gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas nasional.

Apabila eufemisme digunakan untuk melindungi negara dari pandangan negatif, maka disfemisme digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu yang berbeda sisi dengan negara. Kata-kata berbeda sisi mungkin agak berlebihan, karena pada dasarnya tidak semua individu yang melakukan kritik terhadap pemerintah memiliki ideologi tertentu yang berseberangan dengan Pancasila.

Dhakidae menggunakan contoh yang paling umum dalam gejala disfemisme, yakni penggunaan istilah “PKI” terhadap buruh-buruh yang melakukan demo. Dakhidae menguraikan berdasarkan Sambutan dari Rekan Marsinah pada Pemberian Anugerah Hak-Hak Azazi Manusia Yap Thiam Yiem:

“Ketika terjadi demonstrasi pada tanggal 4 Mei 1993 dan ketika melihat adanya poster-poster di depannya maka Satpam marah-marah di depan pintu gerbang [...]: ‘Aku saja yang *pegawai negeri* tak pernah unjuk rasa. Kalian *buruh kecil* unjuk rasa segala, *seperti PKI saja! Belajar dulu sama aku* kalau mau unjuk rasa!’”²⁹

Satu kata yang perlu di sorot dari kutipan di atas adalah kata “PKI”. Sudah jelas bahwa PKI sendiri telah dibubarkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Namun, korelasi antara *buruh*, *tindakan tunjuk rasa*, dengan *PKI* telah melekat di kepala masyarakat. Salah satu indikatornya adalah ketika Kodim memaksa 13 orang wakil buruh untuk menandatangani surat pernyataan *pengunduran diri*. Aparat Kodim “juga menganggap *tindakan unjuk rasa ... itu seperti PKI*”.³⁰ Hal

²⁹ *Ibid.*, p. 424

³⁰ *Ibid.*, p. 430

ini menjadikan disfemisme *seperti pe-ka-i* menjadi *milik* Kodim, yang merupakan bagian dari pemerintah, alih-alih Satpam yang telah disebutkan sebelumnya.³¹

Tidak begitu jauh dari contoh disfemisme yang diuraikan oleh Dakhidae tersebut, Pidato Soeharto juga banyak menunjukkan gejala-gejala disfemisme yang berkaitan dengan PKI. Seperti misalnya dalam Pidato Kenegaraan pada tahun 1971. Soeharto mengingatkan kepada rakyat: “[...] tetap waspada terhadap bahaya sisa-sisa *kekuatan gelap* G-30-S/ PKI [...] mereka tetap berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan *sabotase, subversi, dan kegiatan-kegiatan gelap* lainnya.”³²

Penggunaan kata-kata yang digaris miring merupakan satu gejala disfemisme dalam Pidato Kenegaraan Soeharto, yang tidak hanya disebutkan sekali. Dengan kata lain, istilah-istilah tersebut, khususnya kata *subversi*, secara konsisten digunakan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto di tahun-tahun lainnya. Kata-kata *kekuatan gelap* dan *kegiatan gelap* sangat perlu ditelaah lebih jauh. Dalam berbagai konteks, sesuatu yang gelap biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat buruk.

Kata *gelap* di sini memiliki banyak makna. Kata-kata *kekuatan gelap* kadang diasosiasikan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Ini berarti *kekuatan* yang disebut di sini erat kaitannya dengan kekuatan di luar Ilahi, dengan kata lain kekuatan yang bersifat ‘setan’ atau ‘jahat’. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kata-kata *kekuatan gelap G-30-S/ PKI* dalam Pidato Kenegaraan Soeharto sebagai ‘kekuatan setan’ atau ‘kekuatan jahat’.

³¹ *Ibid.*, p, 431

³² Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1971), p. 32

Berbeda dengan asosiasinya dengan kata ‘kekuatan’, kata ‘gelap’ dapat bermakna lain bila diasosiasikan dengan kata ‘kegiatan’. Sesuatu yang gelap, berarti tidak terkena cahaya sehingga sesuatu tersebut menjadi tak terlihat, dengan kata lain *tersembunyi*. Maka, ketika diasosiasikan, kata ‘kegiatan gelap’ dapat bermakna ‘kegiatan yang sembunyi-sembunyi’, yang juga bisa disebut ‘gerakan bawah tanah’.

Istilah selanjutnya yakni *subversif*, adalah istilah yang lebih mudah kita temukan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto yang lain. Kata ‘subversif’ sendiri berarti tindakan-tindakan yang sifatnya menentang pemerintahan. Menggunakan kata ‘subversif’ dalam konteks yang sama dengan kata-kata ‘kekuatan gelap’, berarti menempatkan kedua konsep tersebut dalam makna yang setara.

Penggunaan kata-kata “kekuatan gelap” dan “subversif” sengaja digunakan untuk meningkatkan intensitas suatu konteks; pihak-pihak yang bertentangan dengan pemerintah merupakan pihak yang salah. Menggunakan istilah-istilah tersebut secara otomatis menciptakan wacana yang berfungsi sebagai norma dan nilai dalam masyarakat Orde Baru.

Contoh-contoh yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari gejala eufemisme dan disfemisme. Apabila kita menelaah bahasa politik yang digunakan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto kita akan dapat menemukan lebih banyak gejala-gejalanya, baik yang berulang, digunakan secara konsisten, maupun yang hanya digunakan sesekali.

C. Negara Milik Orde Baru

Siapapun pada masa kini yang mengetahui sejarah, nampaknya sepakat apabila Orde Baru merupakan satu sistem pemerintahan yang otoriter. Caranya dalam mengendalikan suatu konflik cenderung bersifat represif. Namun, pemerintahan Orde Baru, sangat mengerti bahwa Indonesia telah memasuki zaman peradaban, dimana pengetahuan dapat menjadi kekuatan terbesar bagi siapa-pun, karena itu tindakan represif saja tidaklah cukup.

Meskipun begitu, untuk tahu dan mengerti, terdapat bahasa dan konsep-konsep yang patut dipelajari terlebih dahulu oleh seorang manusia. George Orwell, dalam novelnya yang berjudul “1984”³³ menggambarkan satu wilayah pemerintahan otoriter, Oceania, yang dikendalikan menggunakan bahasa. Orang-orang yang tahu dan mengerti konsep-konsep lama dimusnahkan. Sedangkan dalam dunia yang baru, diciptakanlah kata-kata yang baru. Masyarakat yang baru tidak akan lagi mengerti atau bahkan mengetahui konsep “kebebasan individu” karena konsep tersebut telah dihapuskan. Hal ini menggambarkan bahwa kekuatan suatu bahasa begitu besar, bahkan melebihi kekuatan fisik.

Orde Baru sendiri tidak mencapai satu sistem pemerintahan otoriter se-ekstrim yang digambarkan oleh Orwell, tapi kita dapat melihat gejala-gejala yang serupa di antaranya. Pada awal kekuasaan, jelas dalam fakta sejarah bahwa Orde Baru melakukan pembunuhan massal terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan PKI. Kemudian, setelah berhasil berdiri tegak sebagai pemerintahan yang kokoh, Orde Baru secara aktif melakukan depolitisasi politik. Disamping itu

³³ Baca George Orwell, *1984*, (Yogyakarta: Bentang, 2016)

dilakukan pula pemberangusan pers yang memproduksi berita-berita yang mengeluarkan konsep-konsep yang “membahayakan stabilitas negara”. Lalu dilakukan penyempitan ide publik dengan diarahkannya masyarakat kepada satu ideologi, dan yang terakhir masyarakat selama tiga dekade *dibuat* mendengarkan suatu pidato yang isinya konsisten dalam setiap situasi. Dari segi manapun hal ini merupakan upaya dalam menciptakan satu ide, konsep, sistem bahasa, dan kebudayaan tertentu yang dipahami secara massal. Secara teori, hal-hal ini-lah yang disebut dengan *hegemoni*.

Jika kita bagi menjadi poin-poin penting, ide-ide inilah yang Orde Baru berusaha untuk tanamkan dalam alam pikiran masyarakat: 1) Pancasila adalah asas tunggal yang suci dan mutlak kebenarannya, 2) Pembangunan merupakan sumber kekuatan negara, 3) Stabilitas nasional merupakan prioritas utama, dan 4) Multikulturalisme adalah bibit kehancuran. Penyebaran keempat ide ini dilakukan dengan menggunakan beberapa hal yakni kebijakan resmi, pers, pendidikan, dan pengembangan bahasa serta konsep. Hal ini menjadi suatu sistem yang mengakar setelah 32 tahun.

Pidato kenegaraan merupakan salah satu media penyebarannya yang termasuk dalam kategori penggunaan pers dan pengembangan bahasa. Keempat ide tersebut dapat kita temukan dalam pidato kenegaraan secara konsisten, bahkan dengan intensitas yang tinggi pada tahun-tahun tertentu. Secara sekilas mungkin kekuatan pengikat dari pidato kenegaraan terasa sepele. Kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan dunia politik mungkin tidak akan menelan mentah-mentah begitu saja setiap perkataan presiden dalam pidato kenegaraan. Namun

berbeda hal-nya dengan masyarakat sipil yang tidak *familiar* dengan situasi politik. Ketika penguasa berbicara, maka itulah kebenaran yang diketahui oleh masyarakat.

Melalui sejarah, Orde Baru belajar bahwa kelompok yang memiliki kemampuan untuk melawan suatu rezim adalah kekuatan yang berasal dari jumlah massa yang masif. Karena itu, melalui logika ini dapat kita pastikan bahwa target dari pidato kenegaraan Soeharto adalah masyarakat yang memiliki potensi besar untuk menggalang kekuatan ketika memiliki pengetahuan yang tepat. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya peristiwa Malari.

Peristiwa Malari menyadarkan Soeharto bahwa ia berada di posisi yang sulit. Pihak-pihak yang dulu mendukungnya, kini malah menjadi bumerang baginya, yang dapat menyeretnya ke jurang. Maka sejak peristiwa ini, terlihat perubahan, dimana pemerintahan menjadi semakin represif. Pihak-pihak yang menentang pemerintah atau melakukan demonstrasi otomatis berstatus subversif. Pada pidato kenegaraannya tahun 1974, Soeharto menyebutkan bahwa rakyat tentu memiliki kebebasan berpendapat, tapi tidak menggunakan cara kekerasan. Demonstrasi bukan satu-satunya wajah demokrasi, ucap Soeharto:

“Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang berlindung di balik demokrasi untuk menimbulkan keonaran, atau dengan dalih menegakkan kehidupan konstitusional tetapi bertujuan untuk merombak Pancasila dan Undang-undang 1945. Mengambil sikap atau berbuat yang demikian, akan berarti mengkhianati dan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi itu sendiri.”³⁴

³⁴ Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 1974), p. 16

Melalui kalimat terakhir, Soeharto secara tidak langsung mengatakan bahwa pihak yang melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan konstitusi, berarti adalah musuh negara dan layak untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, batasan ‘tindakan’ yang dimaksud menjadi kabur. Tidak jelas lagi tindakan mana yang sesuai atau tidak karena lama kelamaan, tindakan atau ucapan apapun yang bertentangan dengan pemerintah dianggap subversif.

Dalam pidato yang sama, Soeharto menghimbau adanya penataan kembali wadah organisasi-organisasi, khususnya organisasi mahasiswa. Menurutnya, lebih baik agar wadah-wadah organisasi mahasiswa terlepas dari partai politik ataupun golongan karya. Kemudian ia menekankan bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa Malari. Himbauan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan para mahasiswa dan pemuda. Namun, ucapannya menjadi hal yang paradoks ketika pada 1978 muncul peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus.

Soeharto, dalam pidato-pidato kenegaraannya, memiliki kecenderungan untuk menggunakan kalimat positif, lalu di kalimat selanjutnya mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat pertama, begitu pula sebaliknya. Pidato kenegaraan Soeharto dapat dikatakan penuh dengan paradoks.

Menilik peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, kita dapat melihat bahwa konten dari Pidato Kenegaraan Soeharto tidak terlepas dari situasi politik di Indonesia saat itu. Beberapa hal menarik yang dapat kita lihat adalah adanya pengulangan konsep-konsep dalam pidato Soeharto seperti ‘subversif’, ‘Pancasila’, ‘demokrasi’, dan ‘stabilitas politik’ di setiap pidato-nya.

Pengulangan-pengulangan ini menjadi sesuatu yang lekat dalam ingatan masyarakat, tanpa mereka sadari.

Mungkin tidak banyak yang mau mengakuinya, tetapi permainan konsep dan kalimat dalam pidato Soeharto merupakan salah satu kekuatan pengikat bagi Soeharto. Di samping menggunakan tindakan-tindakan represif, Soeharto menggunakan kalimat-kalimat yang dirangkai untuk membentuk suatu hegemoni. Pidato kenegaraan merupakan simbol resmi dari legitimasi kekuasaan Orde Baru.

BAB IV

KESIMPULAN

Sejak awal berdirinya, pemerintahan Orde Baru telah menegaskan bahwa pemerintahan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Orde Baru harus melewati tahapan-tahapan yang sulit dan penuh dengan gejolak.

Pada momentum pertama kebangkitannya, Orde Baru mendapat kesempatan untuk naik ke panggung sejarah Indonesia melalui peristiwa G30S. Terlepas dari segala versi peristiwa tersebut, Soeharto, sebagai representasi pemerintahan Orde Baru, mengambil kesempatan tersebut. Namun, menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Untuk memulai karirnya sebagai pemimpin, pertama-tama ia harus mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya terlebih dahulu.

Kebencian beberapa kelompok masyarakat terhadap PKI akhirnya digunakan untuk menjatuhkan rezim yang diberi nama Orde Lama. Dengan membenarkan tuduhan terhadap PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa G30S, Orde Baru mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Untuk sementara waktu rakyat yakin bahwa mereka telah aman, berkat kedatangan Orde Baru.

Meskipun begitu, Orde Baru harus mulai menciptakan satu wajah jika ia ingin menjadi pemimpin yang permanen. Dimulailah penyusunan sistem-sistem

yang nantinya menjadi wajah dari Orde Baru: Rencana Pembangunan Lima Tahun. Pembangunan merupakan sumber kekuatan nasional menurut Orde Baru. Pembangunan, merupakan bentuk manifestasi dari ideologi Pancasila. Dengan melakukan pembangunan, kemanusiaan dan keadilan sosial dapat dicapai. Karena itulah pembangunan merupakan prioritas utama bagi Orde Baru.

Permasalahannya adalah bahwa pembangunan butuh ditopang oleh stabilitas nasional. Negara harus aman secara fisik untuk dapat fokus dalam pembangunan negara. Hal ini terbukti dari sejarah ketika pemerintahan Orde Lama mengabaikan pembangunan. Soeharto, menolak untuk mengulangi kesalahan yang sama dengan rezim yang telah dijatuhkannya. Namun, gejolak politik dan sosial merupakan hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat multikultural. Karena itu untuk menopang pembangunan, Orde Baru menggunakan segala cara. Beberapa caranya antara lain dengan melakukan depolitisasi masyarakat, pembinaan sejarah, pembinaan bahasa, dan sosialisasi pengamalan Pancasila. Meskipun begitu, jalan Orde Baru dalam mencapai tujuannya tidaklah mulus. Dalam satu rezim kekuasaan terdapat pertentangan-pertentangan kepentingan di dalamnya. Hal ini berarti pemerintah memiliki masalah secara internal maupun eksternal dan hal inilah yang menyebabkan munculnya gejolak sosial politik.

Soeharto, sebagai pemimpin negara, memiliki kesempatan setiap tahun untuk melaporkan setiap tujuan, perkembangan, masalah-masalah yang dihadapi oleh negara seperti yang telah dijelaskan di atas. Karena itu setiap situasi-situasi sosial politik memiliki kaitan yang sangat erat dengan pidato kenegaraan. Pidato

kenegaraan memiliki suatu gambaran khusus mengenai pandangan penguasa, khususnya Soeharto, mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Dan pidato kenegaraannya tersebut menjadi pernyataan resmi untuk masyarakat luas, menjadi suatu 'kiblat' akan jawaban atas segala permasalahan dalam negara. Hal ini menunjukkan bahwa pidato kenegaraan merupakan salah satu simbol kekuasaan Orde Baru.

Melalui pidato kenegaraan Soeharto, terdapat beberapa hal yang dapat kita tangkap. *Pertama*, bahwa gaya bahasa dan konten pidato Soeharto dipengaruhi oleh latar belakang Soeharto serta latar belakang situasi politik tertentu. Berdasarkan hal tersebut, pidato kenegaraan Orde Baru terbagi menjadi tiga periode, yakni: 1) Awal Kekuasaan (1967-1973), 2) Pergolakan (1974-1984), 3) Masa Tenang (1985-1997). Dalam pidato-pidatonya pada periode pertama, pidato kenegaraan Soeharto belum menimbulkan kesan-kesan otoriter. Konten pidatonya masih dipengaruhi oleh gejolak politik pada masa Orde Lama yang penuh oleh semangat pengembalian nilai Pancasila ke kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada periode kedua, mulai muncul dan berkembang kesan otoriter dalam pidato kenegaraan. Hal ini terlihat dalam gaya bahasa yang semakin tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh negara dan sikapnya yang defensif terhadap Pancasila. Sebaliknya dalam periode terakhir, ketika lawan-lawan Pancasila berhasil ditundukkan, tensi dalam pidato Soeharto menurun. Ia meyakini bahwa Pancasila telah aman dan tidak perlu lagi ia bersikap defensif akan Pancasila.

Kedua, Soeharto menggunakan pidato sebagai alat hegemoni nya dengan berbagai cara: 1) Pembahasan dalam pidato Soeharto sebagian besar membahas hal-hal pragmatis daripada hal-hal ideologis, seperti pembangunan negara, dengan menggunakan data-data statistik; 2) Tersirat dalam pidatonya bahwa pemerintahan Orde Baru menolak ideologi lain selain Pancasila; dan 3) Penggunaan bahasa politik yang baku serta nilai dan norma kesopanan yang otomatis menjadikan Soeharto sebagai pencetus penggunaan bahasa politik yang baik dan benar yang berlaku hingga masa kini.

Poin pertama yakni bahwa pembahasan dalam Pidato Kenegaraan Soeharto sebagian besar membahas hal-hal pragmatis seperti pembangunan negara, menggunakan data-data statistik yang cenderung membosankan. Pidatonya menghindari pembahasan topik-topik politik yang terlalu dalam. Konten-konten semacam ini dapat membuka pintu akan sudut-sudut pandang lain yang tidak diinginkan, yang berasal dari masyarakat sipil. Dapat kita katakan bahwa hal ini merupakan salah satu upaya dalam depolitisasi masyarakat sipil.

Poin kedua, pemerintahan Orde Baru menolak ideologi lain selain Pancasila. Hal ini terlihat dari upaya-upaya Orde Baru dalam ‘melindungi’ Pancasila dari berbagai ancaman. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang paling cocok bagi masyarakat multikultural. Terbukti bahwa sebagian besar konflik di Indonesia disebabkan oleh multikulturalisme yang ada. Mudah bagi oknum-oknum tertentu untuk menciptakan konflik yang bersifat horizontal demi kepentingan politik. Permasalahannya adalah Soeharto bersikap begitu sentimen dan defensif akan Pancasila, hal ini terlihat jelas dalam pidato-pidatonya pada

tahun-tahun 1974-1984. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Soeharto merupakan representasi dari Pancasila, dan hal ini justru menggiringnya ke pemerintahan yang cenderung otoriter.

Poin terakhir berhubungan dengan penggunaan bahasa politik yang hingga kini menjadi isu penting menurut pandangan masyarakat. Penggunaan bahasa politik dengan Bahasa Indonesia yang baku serta dengan nilai dan norma kesopanan mulai digunakan di Indonesia sejak masa Orde baru. Hal ini dapat kita lihat dari perbandingan gaya bahasa dalam pidato Soekarno dan Soeharto. Soekarno cenderung menggunakan bahasa dan konsep-konsep yang lugas, bahkan terkesan kasar dalam pidato-nya. Sebaliknya, Soeharto cenderung menggunakan bahasa yang baku dan dieufemismekan. Gejala ini merupakan salah satu upaya dalam pembinaan bahasa dan konsep. Bila kita perhatikan, hal ini merupakan warisan Orde Baru yang masih hidup dalam kehidupan politik masa kini, di mana pemimpin diharapkan untuk menggunakan kata-kata dengan bahasa baku, halus, serta berada dalam kaidah nilai dan norma kesopanan. Dalam tulisan ini gejala tersebut diasosiasikan dengan perbedaan latar belakang antara Soekarno dan Soeharto. Soekarno sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang *familiar* dengan ideologi-ideologi politik sejak kecil, gambaran seseorang yang pikirannya sangat terbuka akan ide-ide baru. Sebaliknya, Soeharto yang berasal dari desa dan tidak mengenyam pendidikan terlalu tinggi, berlatar belakang militer, serta cenderung terpapar oleh budaya Jawa yang tertutup dengan gagasan baru.

Dalam pidato kenegaraan, secara sekilas kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Soeharto sebagai pemimpin dan bagaimana hal itu mempengaruhi caranya dalam menjalankan pemerintahan. Di satu sisi ia memang mencapai suatu sistem pemerintahan otoriter yang membawanya ke jurang kehancuran pada tahun 1998. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem yang dibangunnya selama masa Orde Baru tidaklah sepenuhnya buruk. Belajar dari Orde Baru juga kita dapat mengerti seberapa besar kekuatan suatu bangsa. Pidato kenegaraan Soeharto merupakan bukti dari suatu sistem kekuasaan yang konsisten yang mengikat dan tanpa disadari, sebagian besarnya telah mengakar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, Benedict R. O'G. *Kuasa Kata Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa. 2000
- Bocock, Robert. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra. _____
- Budiman, Hikmat. *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2002
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1986
- Dakhidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Daliman, A. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012
- Dwipayana, G. dan Ramadhan K. H. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lantoro Gung Persada. 1989
- Edman, Peter. *Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*. Yogyakarta: Narasi. 2015
- Elson, R. E. *Suharto: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Minda Utama. 2005
- Fatah, Eep Saefulloh. *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burungmerak Press. 2010
- Gafur, Abdul. *Pak Harto: Pandangan dan Harapannya*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1987
- Hoed, Benny H. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu. 2014
- Hoed, Benny H. et al. *Bahasa Sebagai Arena Pertarungan: Sebuah Pendahuluan dalam Bahasa Negara versus Bahasa Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*. Jakarta: Obor. 2004

Jenkins, David. *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer di Indonesia 1975-1983*. Depok: Komunitas Bambu. 2010

Kasenda, Peter. *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*. Jakarta: Kompas. 2013

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. 1995
Latif, Yudi. *Genealogi Inteligencia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligencia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana. 2013

Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan. 1996

Montefiore, Simon Sebag. *Pidato-pidato yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-pidato Bersejarah*. _____: ESENSI, 2008

Orwell, George. *1984*. Yogyakarta: Bentang. 2016

Tim Redaksi, *Jasmerah*. Yogyakarta: Palapa. 2013

Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2008

Roeder, O. G. *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*. Jakarta: Gunung Agung. 1982

Wood, Michael. *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*. Yogyakarta: Ombak. 2013

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1968*. <http://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Presiden Republik

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1971. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 15 Agustus 1974. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1978. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1979. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 15 Agustus 1981. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1984. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1985. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Kepustakaan Presiden Perpusnas, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik*

Indonesia Djenderal Soeharto Di Depan Sidang DPR-GR 15 Agustus 1987. <http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/>.

Diakses pada tanggal 9 Februari 2016

Youtube. *Yusril Izha Mahendra-Pengalaman Menulis Naskah Pidato Presiden.*

<https://www.youtube.com/watch?v=7epG20-0qUg>, Diakses pada 15 November 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1968

PIDATO KENEGARAAN

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DJENDERAL SOEHARTO**

DIDEPAN SIDANG DPR-GR

16 AGUSTUS 1968

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I .

S. A. 11

telah mengakibatkan berbagai akibat negatif yang sangat luas, mengakibatkan penyalah-gunaan kekuasaan dan matinya inisiatif masyarakat dan telah memberikan lapangan yang luas dan subur bagi gerakannya PKI yang tidak saja menghambat usaha pembangunan Negara, tetapi membahayakan tegaknya Pantja-Sila dan mengindjak-indjak azas-azas demokrasi.

Djustru oleh karena itulah Bangsa Indonesia telah berhasil menumbangkan kekuatan fisik PKI dan praktek-praktek a-demokratis dan in-konstitusionil. Kita bertekad bulat untuk membaharui kehidupan kita yang demokratis dan konstitusionil berlandaskan pada Pantja-Sila yang murni, sebagai sarana sarana yang fundamental dalam mentjapai tjita-tjita Bangsa, masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan yang berentjana dan bertahap.

Kehidupan demokrasi yang sehat djelas pula merupakan syarat mutlak bagi stabilisasi Nasional yang mantap dan dinamis. Keinginan-keinginan masyarakat dapat tersalur setjara bebas, baik dan terarah. Kehidupan demokrasi yang sehat dengan sendirinya menuntut rasa tanggung-djawab, menuntut disiplin. Artinya, keinginan dan pendapat masyarakat yang teratur setjara baik dan terorganisir harus disalurkan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Tanpa melalui prosedur-prosedur sematjam itu, maka kebebasan hanya berarti kekatjauan.

Disini saja meminta pengertian kita bersama, bahwa terwujudnja demokrasi yang sehat tidak sama artinya dengan pengertian bahwa „politik adalah pemegang komando”. Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya „beramai-ramai” berbitjara soal politik sadja. Kita djuga harus dapat menarik pelajaran yang pandai dalam hal ini. Selama lebih kurang 20 tahun yang lalu, baik dalam masa liberal maupun pada waktu berlangsung kekuasaan yang terpusat pada pimpinan Negara, kita selalu mengalami bahwa perhatian seluruh masyarakat, perhatian setiap golongan hanya ditjurahan pada masalah-masalah politik ini. Akibatnja sangat buruk, jai-

tu semua masalah-masalah lainnja ditundukkan pada perhitungan-perhitungan politik dan dengan sendirinja masalah pembangunan ekonomi diabaikan. Kekuatan-kekuatan produktif dan kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakatpun ikut berbelok perhatiannja semata-mata kepada masalah politik. Kaum buruh melalaikan tugasnja, kaum tani mengabaikan tanaman padinja, nelayan mengabaikan pentjaharian ikan, tjendekiawan dan pekerdja-pekerdja ilmu pengetahuan meninggalkan objektivitas dan pekerdjaan-pekerdjaan research, pegawai negeri dan pedjabat-pedjabat Negara meninggalkan tugas dan tanggung-djawabnja untuk mengusahakan kesedjahteraan dan kemakmuran Rakjatnja, mahasiswa melupakan kuliah, dan anak-anak sekolah melalaikan peladjaran. Pendeknja hampir semua bidang terbelengkalai, karena semua orang, semua golongan, hanja menaruh perhatian pada soal-soal politik. Disamping itu antara golongan-golongan dalam masyarakat timbul ketegangan-ketegangan akibat meruntjingnja semangat dan faham golongan. Karena selalu menggunakan ukuran-ukuran politik dalam segala hal maka segala sesuatu, baik atau tidak baik, biasanja diukur dengan kepentingan golongan. Akibat jang paling buruk adalah timbulnja pola fikiran jang abstrak dan tertjerai-berai pada sebagian masyarakat kita. Ekses-ekses pola berfikir sematjam ini tetap kita rasakan akibat-akibatnja sampai saat ini.

Saudara-saudara sekalian;

Sungguh, kita, terutama para pimpinan Rakjat di Pusat maupun di Daerah-daerah harus menjadari sedalam-dalamnja bahwa pengalaman pahit selama ini, ialah penilaian dan pengurusan masalah-masalah jang dihadapi semata-mata ditinjau dari motif-motif politik dan mengabaikan perhitungan-perhitungan jang wajar dan objektif, hanja akan menghambat usaha pengisian kemerdekaan, hanja menimbulkan apatisme dan merosotnja kemakmuran dikalangan Rakjat.

Sekali lagi saja tekankan, kehidupan demokrasi jang sehat dan kesadaran politik bukanlah harus diartikan tertjurnnja

Lampiran 2

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1969



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pada tahun 1959, kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Sajang, dalam periode ini kemudian timbul penjimpangan-penjimpangan dalam pelaksanaan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Sementara kita tidak bersatu-padu dalam periode 1950 - 1959, sementara kita tidak sungguh-sungguh setia kepada dasar dan tudjuan Kemerdekaan, PKI jang anti Pantja Sila itu sempat menjusun kekuatan jang besar. Kita selalu mengutjap sjukur alhamdulillah, bahwa puntjak penjelewengan Orde-Lama dengan pemberontakan G-30-S/PKI pada achir tahun 1965 itu, dapat kita achiri.

Sedjak tahun 1966 kita membuat lembaran sedjarah baru, ialah dengan lahirnja Orde-Baru. Djaman baru ini intinja adalah : pemurnian kembali tjita-tjita Kemerdekaan, pelurusan kembali djalannja sedjarah kita, pelaksanaan kembali Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Saja perlu menegaskan, bahwa Orde-Baru itu bukan hanja berarti menghantjurkan pemberontakan PKI, bukan hanja meruntuhkan Orde-Lama; melainkan merupakan koreksi total dari segala penjimpangan jang pernah terdjadi selama ini. Koreksi total ini bukan hanja dibidang ideologi, politik, ketatanegaraan; melainkan djuga harus disertai dengan koreksi-koreksi sikap mental dan tjara-tjara bekerdja kita.

Segala matjam pemberontakan tidak boleh berulang lagi, segala matjam penjelewengan terhadap landasan perdjoangan 1945 tidak boleh terdjadi lagi. Dengan Orde-Baru ini kita harus dapat menormalisir keadaan, agar kita dapat segera membangun Bangsa ini, menikmati hasil Kemerdekaan dengan kesedjahteraan bersama.

Normalisasi keadaan itupun harus tetap berdiri diatas landasan perdjoangan dan berdjalan kearah tudjuan perdjoangan.

Sedjarah kita selama ini menundjukkan, bahwa mereka jang akan keluar dari landasan perdjoangan, mereka jang akan menjimpang dari tudjuan perdjoangan, pasti mengalami kehantjuran.

Sekarang,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sekarang, pada peringatan ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan jang ke-24 ini, marilah kita perkuat kebulatan tekad kita untuk terus berpidjak pada landasan perdjjoangan dan bersatu padu meneruskan perdjjalan-an kita bersama menudju tudjuan jang sudah djelas itu.

Saja mengetahui, bahwa sebagian kita merasa bahwa proses normalisasi dalam suasana Orde-Baru ini berdjjalan "lambat". Tiga tahun jang lalu saja telah mengatakan, bahwa terwudjudnja Orde-Baru itu melalui proses sosial jang menjangkut segala segi kehidupan Bangsa kita; jang memang melalui suatu periode transisi, tidak dapat dipaksakan, apalagi dipaksakan dari atas, karena paksaan-paksaan sematjam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi jang djustru akan kita tegakkan kembali. Itulah sebabnja, saja djuga pernah menegaskan, bahwa terwudjudnja Orde-Baru ini adalah tanggung djawab kita bersama; bahwa demokrasi bukan saja hak, melainkan sekaligus adalah kewajiban dan tanggung djawab.

Saudara-saudara sekalian ;

Apakah kewajiban dan tanggung djawab pokok kita ?

Kewajiban dan tanggung djawab pokok itu, pada tingkat pertama, adalah memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta memperkuat Negara Kesatuan Republik ini sebagai wadah tunggal kita semuanya. Selama perdjjoangan menegakkan Orde-Baru kita memiliki solidaritas jang luar biasa, kita memiliki konsensus Nasional jang bulat, ialah menegakkan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Kebulatan inilah jang harus terus kita pelihara.

Memang, kita berbeda-beda dan boleh berbeda-beda. Lambang Negara kita sendiri telah menundjukkan hal itu, Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, dengan perbedaan-perbedaan itu kita harus tetap dapat mewudjudkan persatuan Nasional.

Kita terdiri dari bermatjam-matjam suku, kita memiliki bahasa dan kesenian Daerah jang beraneka ragam, warna kulit kita-pun berbeda-beda, diantara kita menganut agama atau kepertjajaan jang berlain-lainan, kita memiliki partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa sebagai salah satu alat demokrasi; dan perbedaan-perbedaan lainnja.

Perbedaan

Lampiran 3

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1974



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Kita cukup mempunyai wadah penyalur pendapat ; kita mempunyai lembaga-lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional maupun daerah, kita dapat menggunakan kebebasan mimbar, kita memiliki pers yang kita harapkan menjadi pers yang bebas dan bertanggung jawab. Menyampaikan pendapat tidak perlu dengan cara-cara yang mengundang kekacauan dan keonaran, seperti demonstrasi. Demonstrasi bukanlah satu-satunya wajah demokrasi; lebih-lebih demonstrasi yang mendatangkan huru-hara dan bencana.

Hendaknya kita ingat baik-baik ; bahwa hak demokrasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab,

Karena itu jangan lagi ada diantara kita yang berlindung di balik demokrasi untuk menimbulkan keonaran, atau dengan dalih menegakkan kehidupan konstitusional tetapi bertujuan untuk merombak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengambil sikap atau berbuat yang demikian, akan berarti mengkhianati dan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi itu sendiri.

Sidang Dewan yang terhormat ;

Usaha lain dalam rangka menegakkan stabilitas politik dan menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis adalah langkah-langkah kita untuk meneruskan pembinaan kehidupan kepartaian, kekaryaan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya agar ada wadah-wadah yang sehat untuk melibatkan seluruh kekuatan nasional kita dalam pembangunan bangsa di segala bidang.

Langkah-langkah kearah ini telah kita mulai, Dan sekarang harus makin dimantapkan lagi.

Lebih dari 2 tahun yang lalu 9 partai politik telah berfusi menjadi 2 kelompok saja, masing-masing adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.

Organisasi-organisasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Organisasi-organisasi karya yang sangat banyak dahulu juga telah menjadi satu organisasi Golkar. Dengan ini maka apa yang dikehendaki oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah tiga "tanda gambar" saja dalam Pemilihan Umum yang akan datang, pasti akan terlaksana. Kecuali mungkin hambatan psikologis yang lambat laun pasti dapat diatasi, maka landasan untuk pengelompokan partai itu cukup kuat. Karena : semua partai sebagai partainya rakyat Indonesia dengan sendirinya memiliki satu ideologi nasional --ialah Pancasila--, semua partai mempunyai tujuan jangka panjang yang satu pula ialah terwujudnya kehidupan masyarakat seperti yang dituangkan secara khidmat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua partai jelas menggunakan cara-cara yang sama dalam memperjuangkan tujuan nasional ialah cara-cara yang demokratis dan damai. Karena itu dasar pengelompokan bukanlah ideologi golongan yang sempit, melainkan kesamaan dan titik berat perhatian dalam memperjuangkan perbaikan mutu kehidupan masyarakat kita. Ini adalah dasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam jangka panjang partai harus benar-benar jadi milik nasional. Partai-partai perlu membuka pintu halamannya lebar-lebar bagi setiap warga negara Indonesia yang memang menurut ketentuan hukum berhak dan boleh masuk. Kita sungguh-sungguh memerlukan partai yang dapat menjadi wadah penyalur keinginan rakyat dan pendidikan kesadaran politik rakyat, dalam arti : kesadaran atas tanggung jawabnya terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa dalam arti yang luas.

Proses penyederhanaan kehidupan kepartaian ini harus kita percepat dan diberi dasar hukum yang lebih jelas. Untuk itu Undang-undang yang mengatur kepartaian dan kekaryaan harus dapat segera kita selesaikan.

Dewasa ini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dewasa ini sesungguhnya sedang berlangsung penataan kembali seluruh tata kehidupan politik dan sosial. Tatanan lama seperti yang tumbuh salah arah sebelum tahun '66 jelas tidak dapat menjawab kebutuhan kita untuk membangun. Rakyat terkotak-kotak dalam kesempatan ideologi dan golongan. Guru, pegawai negeri, buruh, tani dan nelayan, mahasiswa, pemuda, cendekiawan, pelajar tercerai berai dalam organisasi-organisasi yang tidak lain adalah kelanjutan tangan saja dari partai politik. Akibatnya seluruh masyarakat kita terbelah dalam kepingan kelompok-kelompok kecil yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Tentu saja perhatian kepada pembangunan terdesak ke belakang dan kegiatan pembangunan terbengkalai.

Karena itu penataan kembali kehidupan politik dan sosial adalah mutlak. Mungkin usaha-usaha kita ke arah itu masih banyak hambatan-hambatannya. Tetapi kita harus terus berjalan.

Di kalangan perburuhan kita mencatat kemajuan besar dengan lahirnya Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Organisasi buruh perlu tumbuh secara wajar untuk melindungi kepentingan buruh, terutama terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang, untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam ketrampilan buruh di lapangan pekerjaannya. Dengan begitu organisasi buruh dapat menjadi wadah bagi seluruh buruh untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan. Karena itu saya sangat menganjurkan agar dalam tiap-tiap perusahaan dapat segera dibentuk organisasi buruh.

Pembinaan organisasi buruh haruslah tetap kita lihat dalam kerangka pembangunan nasional dalam arti yang luas. Perlu segera kita fikirkan bersama hubungan antara buruh dan majikan atau perusahaan dalam alam Pancasila. Kedua-duanya harus saling menghormati, saling mengerti kedudukan dan peranannya, sama-sama memahami hak-hak dan kewajibannya, dalam keseluruhan proses produksi. Dalam alam Pancasila terang tidak ada tempat bagi sikap saling berhadap-hadapan ataupun penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah.

Apabila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Apabila sikap dasar ini dapat diciptakan maka dapatlah dihindarkan pemogokan oleh buruh dan penutupan perusahaan oleh majikan karena perselisihan pendapat antara keduanya.

Penataan kembali wadah-wadah dalam masyarakat lainnya pun harus kita teruskan seperti organisasi-organisasi profesi; pemuda dan mahasiswa, tani, nelayan, pegawai, guru, wanita dan sebagainya, terlepas dan tidak terikat pada suatu partai politik ataupun golongan karya.

Dalam hubungan ini saya ingin menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemerintah untuk mengikat kebebasan-golongan-golongan profesi, khususnya mahasiswa dan pemuda, calon-calon pemimpin hari esok. Ikatan demikian bukan saja tidak bijaksana akan tetapi dapat memacetkan pembangunan di hari nanti. Padahal, pembangunan memerlukan kelangsungan. Dan pembangunan yang sekarang juga untuk generasi yang akan datang.

Sekali lagi penataan kembali wadah-wadah dalam masyarakat itu sama sekali tidak berarti adanya kekangan terhadap kebebasan berserikat atau berkumpul. Langkah-langkah tadi juga tidak ada sangkut pautnya dengan kemelut yang ditinggalkan oleh "Peristiwa 15 Januari".

Yang kita lakukan adalah usaha bagaimana kita mengatur sendiri kebebasan itu agar dengan kebebasan tadi kita tetap kreatif dan menjadi bangsa yang kokoh.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

Usaha memperkokoh pertumbuhan bangsa ini merupakan bagian penting dan tujuan tersendiri daripada pembangunan Indonesia. Lebih-lebih karena masyarakat kita adalah masyarakat majemuk; masyarakat yang serba ganda.

Kita terdiri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Kita terdiri dari bermacam-macam suku, kita memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, kita masing-masing mempunyai adat istiadat kedaerahan yang berbeda-beda, karena kulit dan rambut kita pun tidak semuanya sama, kita menganut agama yang berlain-lainan, kita mendiami kepulauan besar kecil yang tidak terbilang jumlahnya di satu Tanah Air yang luas dan indah ini. Kita menyadari perbedaan-perbedaan itu. Akan tetapi jauh di atasnya kita lebih menyadari kebulatan tekad kita untuk bersatu padu sebagai Bangsa Indonesia, kita ingin hidup rukun dalam satu Negara Indonesia, kita telah mengikatkan diri dalam satu Bahasa Indonesia.

Ya, kita memang berbeda-beda tetapi kita bertekad untuk bersatu!

"Bhineka Tunggal Ika"!

Apabila kita ingin bersatu, maka persoalan pokoknya bukan menghilangkan perbedaan-perbedaan tadi. Itu adalah mustahil, karena bertentangan dengan kodrat. Biarlah perbedaan itu ada dan tetap ada. Yang kita usahakan adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu dapat tetap mempersatukan kita dalam persatuan yang indah, seperti indahnya kesatuan warna warni pelangi yang serasi.

Persatuan dalam keaneka ragaman bagi kita bukanlah hal yang mustahil. Kita telah ditempa oleh perjuangan dan sejarah yang panjang untuk bersatu. Lebih dalam lagi, kita sesungguhnya adalah bangsa yang senantiasa mencari keserasian dan keselarasan.

Bagaimana usaha kita memperkokoh kebhineka tunggal ikaan itulah sesungguhnya garis pembinaan dan pembangunan kehidupan sosial politik yang kita arah. Pembangunan kehidupan sosial politik tidak selamanya akan tampak dengan proyek-proyek lahiriah. Pembangunan sosial politik lebih menyentuh pandangan hidup, sikap mental dan dorongan-dorongan rokhani.

Dalam rangka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Dalam rangka ini sangatlah penting artinya pembinaan kehidupan agama dalam masyarakat kita yang serba ganda dan berdasarkan Pancasila itu. Semua agama yang ada di Indonesia ini, memerintahkan ummatnya agar membangun. Agama akan kehilangan sinarnya apabila masyarakatnya miskin, melarat dan lemah. Dan agama menunjukkan tujuan yang jelas daripada pembangunan : ialah untuk kebahagiaan dan martabat manusia; bukan untuk kehancurannya. Agama memperhalus budi pekerti manusia. Dan dengan kehalusan budi pekerti itu pembangunan akan mempunyai makna yang indah dan dalam. Tidak satu agama pun yang melarang orang bekerjasama dengan orang lain yang berlainan agama dalam bersama-sama membangun masyarakat. Karena itu tidak dapat lain, semua ummat beragama di Indonesia harus bersatu padu bahu membahu membangun masyarakat kita dalam kesatuan bangsa dan negaranya. Landasan untuk membina kehidupan bangsa dan masyarakat yang demikian itu juga telah kita miliki, ialah --sekali lagi-- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara kita bukan lah negara agama; bukan negara yang mendasarkan diri pada agama tertentu saja. Pasal 29 Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Mahaesa". Negara diwajibkan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karenanya menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan keagamaan yang sehat di negeri ini. Kita berbesar hati melihat hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan di bidang agama selama PELITA I yang akan ditingkatkan lagi dalam PELITA II. Mesjid dan gereja baru serta tempat ibadah lainnya bermunculan di mana-mana. Setiap tahun Pemerintah mencetak ribuan kitab-kitab suci dari berbagai agama yang ada. Jumlah jemaah haji bertambah besar setiap tahunnya, sedangkan penyelenggaraan perjalanannya semakin tertib dan teratur.

Ini semua

Lampiran 4

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1984



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Namun, selama masih diperlukan mereka pasti akan terus ikut berjuang untuk mengantarkan rakyat Indonesia sejauh mungkin dalam perjalanan menuju tinggal landas itu. Ini berarti pertama-tama Angkatan '45 akan menunjukkan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya untuk ikut mewujudkan kerangka landasan dalam Repelita ke-IV dan mungkin juga memantapkan landasan tersebut dalam Repelita ke-V. Sedikit-tidaknya, Angkatan '45 akan merasa bahagia dan tenteram hatinya, jika telah ada tanda-tanda yang jelas bahwa secara ideologis bangsa kita telah mantap, secara politis bangsa kita telah siap, secara ekonomis bangsa kita telah kuat, secara budaya bangsa kita telah matang dan secara hankam bangsa kita telah siaga mewujudkan dan mengamankan landasan bagi tahap tinggal landas tadi.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

GBHN 1983 memberi amanat luhur bagi kita semua, ialah amanat untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Karena itu pada awal perjalanan kita memasuki Repelita IV ini, sangat lah perlu kita merenungkan sedalam-dalamnya dan dengan perasaan-perasaan yang hening tenang apa yang kita pikirkan mengenai pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tadi.

Yang pertama-tama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang pertama-tama menjadi renungan kita ialah, bahwa penegasan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itu berarti bahwa pembangunan kita selanjutnya harus merupakan kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan yang terus menerus terhadap perjuangan kita di masa lampau yang harus selalu berlandaskan kepada Pancasila.

Karena Pancasila merupakan kepribadian kita sendiri, maka pembangunan kita yang merupakan pengamalan Pancasila itu pun kita rancang dan kita laksanakan menurut konsep dan model kita sendiri. Kita memang perlu mempelajari konsep-konsep atau model-model pembangunan bangsa-bangsa lain. Tetapi adalah salah jika kita meniru begitu saja konsep atau model pembangunan negara lain, sekali pun mereka berhasil melaksanakan di negaranya sendiri. Kita pelajari konsep-konsep dan model-model pembangunan negara lain dengan menyaring apa yang cocok dan apa yang tidak cocok untuk pembangunan kita sendiri.

Kita menyadari bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tidak merupakan konsep atau model yang sekali jadi. Saya sering mengingatkan kita semua agar pengamalan Pancasila itu kita laksanakan secara kritis, kreatif dan dinamis. Dengan demikian Pancasila akan terasa selalu memberi kesegaran dalam kehidupan masyarakat kita.

Konsep dan model pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila akan terus berkembang dan tumbuh dalam menjawab tantangan dan masalah yang kita hadapi dalam pembangunan masyarakat kita dengan selalu berusaha mengamalkan sebaik-baiknya Pancasila itu sebagai satu kebulatan.

Dengan demikian, ...

Lampiran 5

Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1985

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
16 AGUSTUS 1985

REPUBLIK INDONESIA

abad ini kita telah merintis wawasan kebangsaan dan wawasan moderen.

Dan seperti yang juga pernah saya katakan, jika kita berbicara mengenai modernisasi maka pikiran kita sama sekali tidak dikacaukan oleh sifat kebarat-baratan. Modernisasi bagi kita adalah bagaimana usaha kita untuk mengembangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat dan budaya kita sendiri agar kita dapat menjawab tantangan perubahan zaman.

Dalam Pergerakan Kemerdekaan yang berwawasan kebangsaan dan moderen itu bangkit ungkapan-ungkapan yang menonjolkan segi keagamaan, bangkit ungkapan-ungkapan yang menonjolkan segi kerakyatan, bangkit ungkapan-ungkapan yang menonjolkan segi kemanusiaan, bangkit pula ungkapan-ungkapan yang menonjolkan segi keadilan sosial. Karena merupakan Pergerakan Kemerdekaan yang bersumber pada semangat kebangsaan, maka ungkapan-ungkapan tadi digalinya dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan budaya Indonesia sendiri.

Semua ungkapan-ungkapan yang bersumber dari budaya bangsa sendiri itu lah yang kemudian dirangkum dalam kesatuan yang utuh dan serasi oleh Pendiri-pendiri Republik ini, oleh Bapak-bapak Kemerdekaan Nasional kita, dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Selama 20 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dari tahun '45 sampai '65, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila terhadap segala macam ancaman dan marabahaya. Dari tahun '45 hingga pengakuan kedaulatan menjelang akhir tahun '50 kita berjuang dalam Perang Kemerdekaan. Melalui perjuangan yang berat dan lama bangsa kita berhasil membulatkan kembali wilayah Indonesia dengan merebut kembali Irian Jaya pada tahun '62 yang semula masih berada dalam kekuasaan Belanda.

Sejak pengakuan kedaulatan dan pada tahun-tahun sesudahnya kita berjuang melawan bahaya-bahaya yang datang dari

federalisme, separatisme, kesukuan, kedaerahan, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak jarang segala ancaman dan bahaya tadi bercampur dengan subversi asing.

Semuanya itu kita rasakan sebagai bagian dari perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita ke arah kematangan dan kedewasaan. Semuanya itu merupakan pelajaran yang sangat berharga, walaupun harus kita bayar dengan sangat mahal.

Setelah kita mengatasi pengkhianatan pemberontakan PKI pada akhir tahun '65 maka pada dasarnya tahap mempertahankan dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 telah berlangsung dengan selamat, dengan segala pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan mahal harganya.

Walaupun begitu, kita tidak pernah boleh meninggalkan kewaspadaan. Bahkan harus selalu mawas diri dan mengkonsolidasikan diri baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Saya sering mengingatkan bahwa bahaya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 bukan saja akan datang dari luar atau dari ideologi atau paham lain, akan tetapi bisa datang dari diri kita sendiri jika kita tidak mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan keikhlasan.

Setelah tahap mempertahankan dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 itu dapat dikatakan telah mantap, kita segera memasuki tahap pembangunan nasional sebagai kelanjutan perjuangan untuk memberi isi kepada Kemerdekaan.

Pembangunan nasional yang kita pikirkan dan kita laksanakan juga bukan sembarang pembangunan. Melainkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila seperti yang telah kita tegaskan dalam GBHN '83. Penegasan kita mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila ini merupakan ketetapan hati kita

RIWAYAT HIDUP



Virzanira lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1994 dari pasangan suami istri Bapak Rifzanil dan Ibu Esviralda. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Haji Bara I Kavling 46 Pangkalan Jati Baru Limo Depok. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SDI Al-Azhar Kemang Syifa Budi Jakarta Selatan lulus pada tahun 2006, SMPN 19 Jakarta Selatan lulus pada tahun 2009, dan SMAN 47 Jakarta Selatan lulus pada tahun 2012. Dari tahun 2012 penulis melanjutkan studi ke Universitas Negeri Jakarta di program studi Pendidikan Sejarah. Semasa kuliah penulis terlibat dalam beberapa pengalaman kerja lapangan, yakni:

1. Kuliah Kerja Lapangan (2015) di Solo-Jogjakarta dengan hasil penelitian tim bertema Mobilitas Sosial Masyarakat Kampung Laweyan
2. Kuliah Kerja Nyata (2015) di desa Curug Lemo Kecamatan Mandalawangi Banten
3. Praktek Keterampilan Mengajar (2015) di SMAN 90 Jakarta

Hingga penelitian skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Apabila ada kritik dan saran, silahkan hubungi penulis melalui e-mail: virzanira@gmail.com